DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II

BAHAN AJAR

WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (EDISI REVISI)

OLEH:
TIM PUSDIKLAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Nomor: ST-359A/PP.2/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Penyusunan kembali Modul Diklat Prajabatan Golongan II, Sdr. Seger, ditunjuk sebagai penyusun modul Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penunjukan ini sangat beralasan karena penyusun memiliki pengalaman mengajar cukup lama yang memungkinkan penyusun memilih materi yang diharapkan memenuhi kebutuhan belajar bagi peserta Diklat Prajabatan Golongan II.

Hasil Penyusunan modul ini telah dipresentasikan di hadapan para Widyaiswara serta pejabat struktural terkait di lingkungan Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan.

Kami menyetujui modul ini digunakan sebagai bahan ajar bagi peserta Diklat Prajabatan Golongan II, namun mengingat modul Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan studi yang senantiasa berkembang, maka penyempurnaan modul perlu selalu diupayakan agar tetap memenuhi kriteria kemutakhiran dan kualitas.

Pada kesempatan ini, kami mengharapkan saran atau kritik dari semua pihak (termasuk peserta diklat) untuk penyempurnaan modul ini. Setiap saran dan kritik yang membangun akan sangat dihargai.

Atas perhatian dan peran semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2011
Kepala Pusat,

ttd

Tony Rooswiyanto
NIP. 19560404 198203 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

A. **PENDAHULUAN** 1
1 Deskripsi Singkat 1
2 Prasyarat Kompetensi 1
3 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
a. Standar Kompetensi 1
b. Kompetensi Dasar 1
2
4 Relevansi Modul 2

B. **KEGIATAN BELAJAR**
1. Kegiatan Belajar 1
Konsep Dan Pengertian Negara Dan Bangsa 3
a. Indikator 3
b. Uraian dan Contoh 3
1) Terjadinya Negara 3
2) Bentuk Negara dan Pemerintahan 7
3) Sifat-sifat Negara 9
4) Unsur-unsur Negara 10
5) Tujuan dan Fungsi Negara 11
6) Pengertian Bangsa 12
c. Rangkuman 13
d. Latihan 1 14
e. Tes Formatif 14
f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 16

2. Kegiatan Belajar 2
Wawasan Kebangsaan, Integrasi Nasional, dan Konsep Negara Integralistik 18
a. Indikator 18
b. Uraian dan Contoh 18
1) Wawasan Kebangsaan 18
2) Pengertian dan Konsep Integrasi Nasional 23
3) Konsepsi Negara Integralistik 25

c. Rangkuman 27
d. Latihan 2 29
e. Tes Formatif 29
f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 31

3. Kegiatan Belajar 3
Nilai-nilai Kejuangan, Membangun Karakter, dan Ketahanan Bangsa 32
a. Indikator 32
b. Uraian dan Contoh 32
1) Nilai-nilai Kejuangan 32
2) Hakikat Mempelajari Perjuangan Bangsa 33
3) Jiwa dan Makna dalam Perjuangan 34
4) Nilai dan Prinsip yang Diwariskan 35
5) Membangun Karakter 36
6) Faktor-faktor Membangun Karakter Bangsa Indonesia 37
7) Ketahanan Nasional 37
c. Rangkuman 40
d. Latihan 3 42
e. Tes Formatif 42
f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 44
4. Kegiatan Belajar 4
Sosial Budaya dan Wawasan Kebangsaan Sebagai Kekuatan Bangsa 45
a. Indikator 45
b. Uraian dan contoh 45
1) Pengertian Sosial Budaya 45
2) Dinamika Sosial Budaya Indonesia 46
3) Kehidupan Sosial Budaya Manusia 46
4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Sosial Budaya 48
5) Faktor-faktor yang Mendorong Perkembangan Sosial Budaya 48
6) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan di Bidang Sosial Budaya 49
7) Manfaat Keragaman Sosial Budaya sebagai Kekuatan Bangsa 51
8) Wawasan Kebangsaan Sebagai Kekuatan Bangsa 52
9) Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan 54
10) Manfaat/ Makna Wawasan Kebangsaan 56
c. Rangkuman 56
d. Latihan 4 57
e. Tes Formatif 57
f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 61
g. Tes Sumatif 61
h. Kunci Jawaban (Tes Formatif 1-4 dan Tes Sumatif) 68

DAFTAR PUSTAKA 70

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi Singkat

Setiap negara pada hahekatnya memiliki wawasan kebangsaan, demikian juga dengan bangsa Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Wawasan kebangsaan sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami jati diri dan lingkungan keberadaannya, pada dasarnya merupakan penjabaran dari falsafah bangsa, sesuai dengan keadaan wilayah suatu negara dan sejarah yang dialami bangsa itu. Wawasan kebangsaan menentukan cara suatu bangsa memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, sosial-budaya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungan baik ke dalam maupun keluar.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka makna dan hakekat serta pengejawantahan wawasan kebangsaan tersebut penting dipahami oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengingat kedudukannya sebagai salah satu unsur aparatur negara yang berperan sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahan ajar ini disusun untuk peserta Diklat Prajabatan Golongan II selaku Calon Pegawai Negeri Sipil agar memahami wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI, yang ke depan diharapkan akan berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Prasyarat Kompetensi

   Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II/c antara lain mampu menunjukkan komitmen memiliki wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI.

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

   a. Standar Kompetensi

      Setelah mempelajari mata diklat Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para peserta Diklat Prajabatan

Golongan II diharapkan memiliki kesadaran sebagai bangsa yang mampu memandang diri dan lingkungannya di dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan nasional dalam kerangka NKRI.

b. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta mampu:

1) Memiliki dan menjelaskan konsep dan pengertian negara dan bangsa;
2) Memiliki dan menjelaskan pengertian wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI;
3) Memiliki dan menguraikan pengertian dan konsep integrasi nasional;
4) Memiliki dan menjelaskan nilai-nilai kejuangan, nilai dan prinsip yang diwariskan;
5) Memiliki dan menjelaskan pengertian membangun karakter dan ketahanan bangsa;
6) Memiliki dan menjelaskan keragaman sosial budaya sebagai kekuatan bangsa;
7) Memiliki dan menjelaskan wawasan kebangsaan sebagai kekuatan bangsa.

4. Relevansi Modul

Kegunaan modul ini bagi peserta diklat yang telah memiliki wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI adalah diharapkan mampu menerapkannya dengan sungguh-sunguh dalam tugas di unit kerjanya dan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Kegiatan Belajar

1. Kegiatan Belajar 1

Konsep Dan Pengertian Negara Dan Bangsa

a. Indikator

1.Mampu menjelaskan tentang teori mengenai negara
2.Mampu menjelaskan tentang bentuk negara dan pemerintahan
3.Mampu menjelaskan tentang sifat-sifat negara
4.Mampu menjelaskan tentang unsur-unsur negara
5.Mampu menjelaskan tentang tujuan dan fungsi negara
6.Mampu menjelaskan tentang pengertian bangsa

b. Uraian dan contoh

Kegiatan belajar 1 ini membahas konsep dan teori terjadinya negara, bentuk negara, unsur negara serta pengertian bangsa, yang hanya menjelaskan secar pokok-pokok saja agar para peserta dapat mengerti dan memahami konsep dimaksud dan penerapannya di Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik karena ilmu negara adalah disiplin sendiri guna memahami hakekat tentang negara dan bangsa, serta teori mengenai negara secara lengkap.

1) Terjadinya Negara

Seperti yang dikatakan oleh Jean Jacques Rousseau di dalam salah satu bukunya "*Du Contract Social*" (1712-1778) manusia adalah makhluk sosial yang hidup selalu bersama-sama dalam satu kelompok (*Zoon Politicoon*) untuk mempertahankan hidupnya. Untuk mempertahankan hidupnya tersebut mereka membutuhkan orang lain untuk saling membantu dan bekerja sama.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kelompok manusia itu pada awalnya berburu binatang, sehingga selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Seiring dengan perkembangan waktu kelompok tersebut mulai hidup menetap pada suatu daerah tertentu dengan bercocok tanam dan beternak. Untuk memimpin kelompok, mulailah ditunjuk pemimpin kelompok yang terdiri dari perseorangan ataupun sekelompok orang. Kepada pemimpin kelompok diberi kewenangan-kewenangan di dalam menentukan aturan atau kaedah sebagai tatanan kehidupan dalam kelompok dan anggota-anggota kelompok diharuskan

mentaati aturan-aturan dan perintah pimpinannya, maka dalam kelompok itu telah terbentuk suatu kekuasaan/ pemerintahan yang sederhana.

Anggota-anggota kelompok mengakui serta mendukung kaedah dan tatanan kehidupan serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin mereka. Tatanan hidup dan peraturan-peraturan tersebut mulanya tidak tertulis dan hanya merupakan kebiasaan saja. Kemudian peraturan-peraturan hidup itu ditetapkan secara permanen dalam bentuk tanda-tanda tertentu yang kemudian dibuat secara tertulis.

Jumlah mereka makin banyak, kepentingan-kepentingan dalam kelompok makin luas dan kompleks, kesulitan dan bahaya-bahaya dari dalam maupun dari luar mulai mengancam kehidupan kelompok mereka, sehingga untuk melindungi kepentingan mereka mulailah dibentuk suatu Negara melalui perjanjian di antara anggota kelompok tersebut, negara yang sangat sederhana pada masa itu.

Untuk pembahasan lebih lanjut, marilah kita meninjau teori-teori tentang terjadinya Negara.

Terdapat dua pendekatan tentang terjadinya Negara, yaitu pendekatan faktual dan pendekatan teoritis.

a) Pendekatan Faktual (Primer)

Pendekatan faktual adalah melihat terjadinya suatu Negara berdasarkan kenyataan yang sebenarnya terjadi atau sudah menjadi pengalaman sejarah, seperti:

(1). *Occupatie*: pendudukan suatu wilayah yang semula tidak bertuan oleh sekelompok manusia/ suatu bangsa yang kemudian mendirikan negara di wilayah tersebut. Contoh: Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan pada tahun 1847.

(2). *Separatie*: Suatu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu, kemudian memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan kemerdekaan. Contoh: Belgia pada tahun 1839 melepaskan diri dari Belanda, Bosnia dan Kroatia yang memisahkan diri dari Yugoslavia.

(3). *Fusi*: beberapa negara melebur menjadi satu negara baru. Contoh: Jerman Barat dan Jerman Timur yang melebur menjadi Jerman.

(4). *Inovatie*: Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian di atas bekas wilayah negara itu timbul negara(-negara) baru. Contoh: pada tahun 1832 Colombia pecah menjadi negara-negara baru, yaitu Venezuela dan Colombia Baru.

(5). *Cessie*: penyerahan suatu daerah kepada negara lain. Contoh: Sleeswijk diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman).

(6). *Accessie*: bertambahnya tanah dari lumpur yang mengeras di kuala sungai (atau daratan yang timbul dari dasar laut) dan menjadi wilayah yang dapat dihuni manusia sehingga suatu ketika telah memenuhi unsur-unsur terbentuknya negara.

(7). *Anexatie*: penaklukan suatu wilayah yang memungkinkan pendirian suatu negara di wilayah itu setelah 30 tahun tanpa reaksi yang memadai dari penduduk setempat.

(8). *Proklamasi*: pernyataan kemerdekaan yang dilakukan setelah keberhasilan merebut kembali wilayah yang dijajah bangsa/ negara asing. Contoh: Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

b) Pendekatan Teoritis (Sekunder)

Pendekatan teoritis yaitu pendekatan dengan melihat bagaimana asal mula terbentuknya negara melalui metode filosofis tanpa mencari bukti-bukti sejarah tentang hal tersebut, melainkan dengan dugaan-dugaan berdasarkan pemikiran logis, seperti:

(1). Teori Kenyataan

Bilamana pada suatu ketika unsur-unsur negara (wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat) terpenuhi, maka pada saat itu pula negara itu menjadi suatu kenyataan.

(2). Teori Ketuhanan

Timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak-Nya. Friederich Julius Stahl (1802-1861) menyatakan bahwa “Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan karena perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan”.

Ciri negara yang menganut teori Ketuhanan dapat dilihat pada Konstitusi berbagai negara yang antara lain mencantumkan frasa: “Berkat rahmat Tuhan …” atau *“By the grace of God”.*

(3). Teori Perjanjian Masyarakat

Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Pada waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya sehingga kekacauan mudah terjadi di manapun dan kapanpun. Tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas, sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Hobbes: "*Homo homini lupus"* dan "*Bellum omnium contra omnes"*. Teori Perjanjian Masyarakat diungkapkannya dalam buku *Leviathan*. Ketakutan akan kehidupan berciri "*survival of the fittest"* itulah yang menyadarkan manusia akan kebutuhannya: "*Negara yang diperintah oleh seorang raja yang dapat menghapus rasa takut*".

Penganut teori Perjanjian Masyarakat antara lain: Grotius (1583-1645), John Locke (1632-1704), Immanuel Kant (1724-1804), Thomas Hobbes (1588-1679), J.J. Rousseau (1712-1778).

(4). Teori Kekuasaan

Teori Kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sebagaimana dinyatakan oleh Kallikles dan Voltaire: "*Raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil*".

(5). Teori Hukum Alam

Para penganut teori hukum alam menganggap adanya hukum yang berlaku abadi dan universal (tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat). Hukum alam bukan buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam. Menurut penganut teori ini, bahwa Negara terbentuk melalui proses yang sederhana, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Keluarga → Kelompok → Desa → Kota/Negara

Penganut Teori Hukum Alam antara lain:

- Masa Purba: Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM)
- Masa Abad Pertengahan: Augustinus (354-430) dan Thomas Aquino (1226-1234)
- Masa *Renaissance*: para penganut teori Perjanjian Masyarakat (JJ. Rousseau, John Locke, Thomas Hobes, Grotius, dan Immanuel Kant).

Dengan mengutip kata Grotius, Arief Budiman (2002), menyatakan bahwa negara terjadi karena suatu persetujuan, karena tanpa negara orang tak dapat

menyelamatkan dirinya dengan cukup. Dari persetujuan itu lahirlah kekuasaan untuk memerintah. Kekuasaan tertinggi untul memerintah ini dinamakan kedaulatan. Kedaulatan itu dipegang oleh orang yang tidak tunduk pada kekuasaan orang lain, sehingga ia tidak dapat diganggu gugat oleh kemauan manusia. Negara adalah berdaulat.

c) Terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terjadinya atau berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

(1). Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia melewati suatu proses perjuangan yang panjang dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat.

(2). Proklamasi barulah “mengantarkan bangsa Indonesia” sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan, belum merdeka dalam pengertian yang hakiki karena masih banyak permasalahan bangsa yang harus dituntaskan.

(3). Berdirinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan sekedar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai (*borjuis*) atau golongan ekonomi lemah untuk menentang ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.

(4). Unsur religius terbentuknya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Unsur inilah yang kemudian dituangkan dalam pokok pikiran keempat yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu bahwa Bangsa Indonesia mendasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.

(5). Keadaan bernegara yang kita cita-citakan bukanlah sekedar terbentuknya pemerintahan, wilayah dan bangsa, melainkan harus kita isi menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur sebagaimana tertuang di dalam Alinea ke II Pembukaan UUD 1945.

2) Bentuk Negara dan Pemerintahan

Bentuk Negara dan bentuk pemerintahan yang pada umumnya dianut oleh Negara-negara di dunia adalah:

a) Bentuk Negara

(1). Negara kesatuan: Suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah secara totalitas.

Negara Kesatuan dapat berbentuk:

- Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
- Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra.

(2). Negara Serikat (Federasi): Suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu, yang asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dengan negara serikat, berarti ia telah melepaskan sebagian kekuasaannya dengan menyerahkan kepada negara serikat itu. Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu (limiatif) yang merupakan *delegated powers* (kekuasaan yang didelegasikan).
Kekuasaan Asli ada pada negara bagian karena berhubungan langsung dengan rakyatnya. Penyerahan kekuasaannya kepada negara serikat adalah hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos. Dapat juga diartikan bahwa bidang kegiatan pemerintah federasi adalah urusan-urusan selebihnya dari pemerintah negara-negara bagian (*residuary powers*).

b) Bentuk Pemerintahan

(1). Kerajaan (Monarki) adalah suatu negara yang kepala negaranya adalah seorang Raja, Sultan, atau Kaisar dan Ratu. Kepala negara diangkat (dinobatkan) secara turun-temurun dengan memilih putera/puteri tertua (sesuai dengan budaya setempat) dari isteri yang sah (permaisuri).
Ada beberapa macam kerajaan (Monarki)

- Monarki Mutlak, yaitu seluruh kekuasan negara berada di tangan raja yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang tidak terbatas, mutlak. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Kehendak negara adalah kehendak Raja (*l'etat c'est moi*).
- Monarki Konstitusional yaitu suatu monarki, dimana kekuasaan raja itu dibatasi oleh suatu konstitusi (undang-undang dasar). Raja tidak

boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi dan segala perbuatannya harus berdasarkan pada Konstitusi.

- Monarki parlementer yaitu suatu monarki, dimana para Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Raja atau kepala negara merupakan lambang kesatuan negara yang tidak dapat diganggu gugat (*the king can do no wrong*). Yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah adalah menteri baik bersama-sama untuk keseluruhan maupun seorangan untuk porto polionya sendiri (sistem tanggung jawab menteri).

(2). Republik, adalah negara dimana kepala negaranya seorang presiden. Republik dapat dibedakan dalam 2 bentuk yaitu serikat dan kesatuan. Seperti juga dalam Negara kerajaan, Negara republik juga dapat memiliki perdana menteri (PM) yang sudah barang tentu presiden terpilih tidak lebih dari seorang simbol, kecuali sistem pemerintahannya memberikan posisi dominan kepada presiden yaitu dengan jalan tidak dapat dijatuhkan oleh mosi tidak percaya parlemen, hal itu dicantumkan dalam konstitusi Negara tersebut.

Sama hal nya monarki republik itu dapat dibagi menjadi:

1. Republik mutlak (*absolute*)
2. Republik konstitusi
3. Repulik parlemen

Aristoteles, filosofi klasik Yunani ternama membagi Negara dalam bentuk pemerintahnya sebagai berikut:

1. *Monarki*: pimpinan (pemerintah) tertinggi negara terletak di tangan satu orang (mono: satu; *archein*: pemerintah).
2. *Ologarki*: pimpinan (pemerintah) Negara terletak dalam tangan beberapa orang biasanya dari kalangan golongan feodal, golongan yang berkuasa).
3. Demokrasi: pimpinan (pemerintah) tertinggi Negara terletak di tangan rakyat (*demos*: rakyat).

3) Sifat-sifat Negara

Menurut Miriam Budiardjo (2010), Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada Negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya.

Sifat-sifat Negara tersebut pada umumnya adalah:

a) Memaksa

Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka Negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Unsur memaksa yang lain misalnya, dalam pengenaan pajak.

b) Monopoli

Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena itu dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

c) Mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*)

Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang-lingkup aktivitas Negara, maka usaha Negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.

4) Unsur-unsur Negara

Negara terdiri dari beberapa unsur yang dapat dirinci sebagai berikut (Miriam Budiardjo, 2010):

a) Wilayah

Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya.

b) Penduduk

Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya.

c) Pemerintah

Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain.

d) Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturannya (kedaulatan ke dalam – *internal sovereignty*). Disamping itu negara memepertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar (*external sovereignty*).

5) Tujuan dan Fungsi Negara

Miriam Budiardjo (2010) menyatakan bahwa Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*).

Roger H. Soltau dalam Miriam Budiardjo (2010) menyatakan bahwa tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya "berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (*the freest possible development and creative self-expression of its members*)". Sedangkan nenurut Harold J. Laski "menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (*creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires*)".

Setiap negara terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu yaitu:

a) Melaksanakan penertiban (*law and order*), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dalam hal ini negara bertindak sebagai "*stabilisator*"
b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
c) Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar.
d) Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Charles E. Merriam menyebutkan lima fungsi negara, yaitu: 1) Keamanan ekstern, 2) ketertiban intern, 3) keadilan, 4) kesejahteraan umum, dan 5) kebebasan.

6) Pengertian Bangsa

Bangsa merupakan kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara, yang dalam arti sosiologis termasuk kelompok paguyuban yang secara kodrat ditakdirkan hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara seperti Negara Republik Indonesia yang ditakdirkan terdiri dari berbagai suku bangsa. Budiyanto dalam Suhady dan Sinaga (2006) mengemukakan pendapat beberapa pakar kenegaraan sebagai berikut:

a) Ernest Renan (Perancis)

Bangsa (*nation*) adalah suatu solidaritas, suatu jiwa, suatu asas spiritual, suatu solidaritas yang dapat tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah lampau dan bersedia dibuat di masa yang akan datang.

b) Otto Bauer (Jerman)

Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.

c) F. Ratzel (Jeman)

Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya (paham geopolitik).

d) Hans Kohn (Jerman)

Bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang mebedakannya dengan bangsa lain. Faktor-faktor itu berupa persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, dan agama.

e) Fredrich Hertz dalam bukunya "*Nationality in History and Politics*" mengemukakan bahwa setiap bangsa mempunyai 4 (empat) unsur aspirasi sebagai berikut:

(1). Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.

(2). Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.

(3). Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualisme, keaslian, atau kekhasan.

(4). Keinginan untuk menonjol (unggul) diantara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise.

c. Rangkuman

Manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan orang lain, untuk itu mereka membentuk kelompok yang saling menunjang (*zoon politicon*). Dalam hidup berkelompok itulah mereka membutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengatur melalui aturan-aturan yang dibuatnya dan harus dipatuhi oleh semua anggota kelompok tersebut, disinilah awal mula terbentuknya negara, meskipun sangat sederhana.

Dalam memahami terjadinya Negara, terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan faktual (primer) yang melihat terjadinya suatu Negara berdasarkan kenyataan yang sebenarnya terjadi atau sudah menjadi pengalaman sejarah, dan pendekatan teoritis (sekunder) yang melihat bagaimana asal mula terbentuknya negara melalui metode filosofis tanpa mencari bukti-bukti sejarah tentang hal tersebut, melainkan dengan dugaan-dugaan berdasarkan pemikiran logis.

Pada umumnya bentuk negara yang dianut oleh negara-negara di dunia bisa berbentuk negara kesatuan, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun serikat, seperti yang dianut oleh negara Amerika Serikat. Sedangkan bentuk pemerintahannya bisa kerajaan (monarki) atau republik.

Sebagai organisasi kekuasaan, negara mempunyai sifat-sfat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya, seperti memaksa, monopoli, dan mencakup semua (*all-encompassing*). Sifat-sifat yang demikian memang harus dimiliki oleh suatu negara, sebab negara mempunyai kewajiban di dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat, disamping negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat juga kewenangan negara dalam membuat peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi oleh semua orang tanpa kecuali.

d. Latihan 1

Agar anda dapat lebih memahami materi pada kegiatan belajar 1 ini, coba kerjakan latihan-latihan berikut ini, bila anda mengalami kesulitan mengerjakan latihan ini sesuaikan pemahaman anda dengan materi yang terdapat dalam kegiatan belajar 1 ini.

1. Terbentuknya negara melalui proses yang sangat sederhana, coba jelaskan tahapan-tahapan proses terjadinya negara tersebut.
2. Terjadinya negara dapat dipahami melalui dua pendekatan, jelaskan dan berikan contohnya. Dan bagaimana pula proses terjadinya negara Indonesia.
3. Uraikan secara jelas bentuk-bentuk negara dan bentuk-bentuk pemerintahan yang Saudara ketahui dan beikan contohnya.
4. Jelaskan sifat-sifat dan unsur-unsur negara.
5. Jelaskan yang dimaksud dengan istilah “bangsa” yang anda ketahui.

e. Tes Formatif

I. Jawablah B jika Pernyataan benar, dan S jika Pernyataan salah

1. Seperti dikatakan oleh JJ Rouseau, bahwa manusia merupakan *zoon politicon* sehingga manusia tidak lagi perlu hidup berkelompok dan saling membantu dalam memenuhi hajat hidupnya.
2. Proses terjadinya suatu negara bisa dilihat melalui pendekatan teoritis, praktis, maupun filosofis.
3. Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 baru mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia.
4. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memuat pernyataan mengenai bentuk negara Indonesia.
5. Negara merupakan kumpulan dari masyarakat yang membentuk suatu bangsa.

II. Pilihlah satu jawaban yang paling benar!

6. Beberapa negara yang melebur kemudian membentuk negara baru disebut ….
   a. *occupatie*
   b. *separate*
   c. *fusi*
   d. *inovasi*

7. Penganut teori perjanjian masyarakat adalah ….
   a. Aristoteles
   b. Thomas Hobes
   c. Leviathan
   d. Thomas Aquino
8. Berlakunya Konstitusi RIS, Indonesia menganut bentuk pemerintahan ….
   a. monarkhi
   b. presidensiil
   c. parlementer
   d. federasi
9. Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter, seperti dikemukakan oleh ….
   a. Otto Bauer
   b. Charles E. Merriam
   c. Ernest Renan
   d. Prajudi Atmosudirdjo
10. "Memaksa" mempunyai pengertian bahwa negara ….
   a. mempunyai wewenang untuk memaksakan kehendak di bidang politik kepada masyarakatnya
   b. dapat memaksakan agar suatu peraturan perundang-undangan dipatuhi oleh masyarakat
   c. memiliki hak di dalam lapangan administrasi negara
   d. dapat memaksa agar setiap pejabat negara berorientasi pada kepentingan negara.

III. Pilihlah A jika pernyataan 1, 2, dan 3 benar
B jika pernyataan 1 dan 3 benar
C jika pernyataan 2 dan 4 benar
D jika semua pernyataan benar

11. Pendekatan faktual dalam melihat terbentuknya negara adalah ….
   1. occupatie
   2. separate
   3. fusi
   4. inovatie

12. Penganut teori perjanjian masyarakat adalah ….
    1. Thomas Hobes
    2. John Lokce
    3. JJ Rousseau
    4. Voltaire
13. Bentuk-bentuk monarki yang dikenal adalah ….
    1. Monarki absolute
    2. Monarki parlementer
    3. Monarki konstitusional
    4. Monarki federasi
14. Berikut yang bukan merupakan sifat negara adalah ….
    1. memaksa
    2. kedaulatan
    3. monopoli
    4. wilayah
15. Menurut Fredrich Hertz, bahwa setiap negara memiliki unsur-unsur keinginan untuk mencapai hal-hal berikut ….
    1. kesatuan nasional
    2. kemerdekaan dan kebebasan nasional
    3. mandiri, unggul, asli, dan khas
    4. menonjol di antara bangsa-bangsa lain

f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban anda dengan Kunci Jawaban yang tersedia. Hitunglah jawaban anda dengan benar, kemudian gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat pemahaman anda terhadap materi kegiatan belajar ini.

$$\textbf{Nilai} = \frac{\textbf{Jumlah jawaban yang benar}}{\textbf{Jumlah keseluruhan soal}} \times 100$$

Kriteria Nilai

91	-	100	Sangat Baik
81	-	90	Baik
71	-	80	Cukup
61	-	70	Kurang
0	-	60	Sangat Kurang

Apabila nilai anda mencapai 81 atau lebih, berarti anda telah memahami materi kegiatan belajar ini.

Namun apabila nilai anda kurang dari 81, anda harus mempelajari kembali materi kegiatan belajar ini.

2. Kegiatan Belajar 2

Wawasan Kebangsaan, Integrasi Nasional, dan Konsep Negara Integralistik

a. Indikator

1. Mampu menjelaskan tentang wawasan kebangsaan
2. Mampu menjelaskan tentang pengertian dan konsep integrasi nasional
3. Mampu menjelaskan tentang konsepsi negara integralistik

b. Uraian dan contoh

Kegiatan belajar 2 ini membahas konsep dan pengertian wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengertian integrasi nasional, dan konsep negara integralistik.

1) Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum colonial terus menggunakan politik "*devide et impera*". Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata.

Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional itu, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi/perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan kewanitaan.

Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar "Satu Nusa, Satu Bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia".

Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawantahan dari satu Wawasan Kebangsaan.

a) Pengertian Wawasan Kebangsaan

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan “Kebangsaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah “wawasan” berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan (Suhady dan Sinaga, 2006).

“Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.

Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prof. Muladi, Gubernur Lemhannas RI, meyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat

persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.

Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga, 2006).

Dengan demikian dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain bagaimana kita memahami Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan POLEKSOSBUD dan HANKAM.

b) Wawasan Kebangsaan Indonesia

Konsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila sebagaimana terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Dorongan yang melahirkan kebangsaan kita bersumber dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan, memulihkan martabat kita sebagai manusia. Wawasan kebangsaan Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial. Konsep kebangsaan kita bertujuan membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan.

Dalam zaman Kebangkitan Nasional 1908 yang dipelopori oleh Budi Utomo menjadi tonggak terjadinya proses Bhineka Tunggal Ika. Berdirinya Budi Utomo telah mendorong terjadinya gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi yang sangat majemuk, baik di pandang dari tujuan maupun dasarnya.

Dengan Sumpah Pemuda, gerakan Kebangkitan Nasional, khususnya kaum pemuda berusaha memadukan kebhinnekaan dengan ketunggalikaan. Kemajemukan, keanekaragaman seperti suku bangsa , adat istiadat, kebudayaan,

bahasa daerah, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tetap ada dan dihormati.

Wawasan kebangsaan Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas satu, kelas dua, mayoritas atau minoritas. Hal ini antara lain dibuktikan dengan tidak dipergunakannya bahasa Jawa misalnya, sebagai bahasa nasional tetapi justru bahasa melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia.

Derasnya pengaruh globalisasi, bukan mustahil akan memporak porandakan adat budaya yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa dan akan melemahkan paham nasionalisme. Paham nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditunjukan kepada negara dan bangsa.

Meskipun dalam awal pertumbuhan nasionalisme diwarnai oleh slogan yang sangat terkenal, yaitu: *liberty, equality, fraternality*, yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang demokratis, namun dalam perkembangannya nasionalisme pada setiap bangsa sangat diwarnai oleh nilai-nilai dasar yang berkembang dalam masyarakatnya masing-masing, sehingga memberikan ciri khas bagi masing-masing bangsa.

Wawasan kebangsaan Indonesia menjadikan bangsa yang tidak dapat mengisolasi diri dari bangsa lain yang menjiwai semangat bangsa bahari yang terimplementasikan menjadi wawasan nusantara bahwa wilayah laut Indonesia adalah bagian dari wilayah negara kepulauan yang diakui dunia. Wawasan kebangsaan merupakan pandangan yang menyatakan negara Indonesia merupakan satu kesatuan dipandang dari semua aspek sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahan semua dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan nasional yang mencakup kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan keamanan (Suhady dan Sinaga, 2006).

Wawasan kebangsaan Indonesia yang menjadi sumber perumusan kebijakan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pengembangan otonomi daerah harus dapat mencegah disintegrasi / pemecahan negara kesatuan, mencegah merongrong wibawa pemerintah pusat, mencegah timbulnya pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Melalui upaya tersebut diharapkan dapat terwujud pemerintah pusat yang bersih dan akuntabel dan pemerintah daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah dengan terwujudnya kesatuan

ekonomi, kokohnya kesatuan politik, berkembangnya kesatuan budaya yang memerlukan warga bangsa yang kompak dan bersatu dengan ciri kebangsaan, netralitas birokrasi pemerintahan yang berwawasan kebangsaan, sistem pendidikan yang menghasilkan kader pembangunan berwawasan kebangsaan.

Wawasan kebangsaan Indonesia memberi peran bagi bangsa Indonesia untuk proaktif mengantisipasi perkembangan lingkungan stratejik dengan memberi contoh bagi bangsa lain dalam membina identitas, kemandirian dan menghadapi tantangan dari luar tanpa konfrontasi dengan meyakinkan bangsa lain bahwa eksistensi bangsa merupakan aset yang diperlukan dalam mengembangkan nilai kemanusiaan yang beradab (Sumitro dalam Suhady dan Sinaga, 2006).

Akhirnya, bagi bangsa Indonesia, untuk memahami bagaimana wawasan kebangsaan perlu memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.

c) Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna:

(1). Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

(2). Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan;

(3). Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik;

(4). Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia;

(5). NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.

d) Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:

(1). Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;

(2). Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merkeka, dan besatu;
(3). Cinta akan tanah air dan bangsa;
(4). Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
(5). Kesetiakawanan sosial;
(6). Masyarakat adil-makmur.

2) Pengertian dan Konsep Integrasi Nasional

Sebagai suatu bangsa yang sadar akan pentingnya arti integrasi nasional dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh para *founding fathers*, maka sebagai generasi muda penerus cita-cita tersebut, layaklah kiranya jikalau kita menyadari arti dan makna pentingnya integrasi nasional sebagai upaya menjaga stabilitas guna mensukseskan pembangunan nasional.

a) Pengertian Integrasi Nasional

Istilah integrasi nasional terdiri dari dua unsur kata, yakni “integrasi” dan “nasional”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2002, dikemukakan bahwa istilah integrasi mempunyai pengertian “pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat”. Sedangkan istilah “nasional” mempunyai pengertian:

(1). bersifat kebangsaan;
(2). berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri;
(3). meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional; tarian nasional, perusahaan nasional, dan sebagainya.

Mengacu pada penjelasan kedua istilah di atas maka integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan kesimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa (Suhady dan Sinaga, 2006).

Claude Ake dalam Nazaruddin Syamsudin (1994) mengemukakan bahwa integrasi nasional pada dasarnya mencakup dua masalah pokok, yaitu:

Pertama, bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan-tuntutan negara, yang mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang dimiliki negara;

Kedua, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur perilaku politik setiap anggota masyarakat. Konsensus ini tumbuh dan berkembang di atas nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Maurice Duverger, integrasi didefinisikan sebagai "*Dibangunnya interdependensi yang lebih rapat antara bagian-bagian antara organism hidup atau antar anggota-anggota dalam masyarakat*". Sehingga dengan demikian integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat yang cenderung membuatnya menjadi suatu kata yang harmonis yang didasarkan pada tatanan yang oleh anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya.

Dari dua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya integrasi merupakan upaya politik/ kekuasaan untuk menyatukan semua unsur masyarakat yang majemuk harus tunduk pada aturan-aturan kebijakan politik yang dibangun dari nilai-nilai kultur yang ada dalam masyarakat majemuk tadi, sehingga terjadi kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan nasional pada masa yang akan datang untuk kepentingan bersama.

Lebih lanjut Nazaruddin Sjamsudin mengemukakan bahwa integrasi lazim dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika kelompok sosial tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan-hubungan sosial, ekonomi, politik. Kelompok-kelompok sosial tersebut dapat terwujud atas Dasar agama dan kepercayaan, suku, ras, dan kelas. Konsepsi tersebut mengisyaratkan bahwa integrasi tercipta melalui proses interaksi dan komunikasi yang efektif.

b) **Integrasi Nasional Indonesia dan Permasalahannya**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2002, kata "Integrasi" (n = *noun* = kt. Benda) memiliki makna pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan "Nasional" (a = *ajective* = kt. sifat), mempunyai arti (1) bersifat kebangsaan; (2) berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; (3) meliputi suatu bangsa. Dengan demikian "Integrasi Nasional" dapat diartikan "pembauran atau penyatuan berbagai elemen dalam masyarakat yang memiliki perbedaan baik dari segi etnis, sosial, budaya, atau latar belakang ekonomi hingga menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh".

Secara umum integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitis, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Proses pembentukan

integrasi bangsa telah dimulai dengan lahirnya semboyan **BHINEKA TUNGGAL IKA** yang berarti "*berbeda-beda tetapi tetap satu jua*", suatu semboyan yang dapat membangkitkan semangat kebersamaan, persatuan dalam bingkai negara kesatuan Indonesia, meskipun terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Namun demikian harus diakui bahwa kita masih menyimpan banyak masalah yang harus diselesaikan, dan kita meninggalkan luka yang masih menyakitkan pada diri kita sebagai bangsa yang harus kita sembuhkan:

(1). Masalah pertama adalah membangun kembali integrasi vertikal antara pusat dan daerah, antara elite dan massa yang mengalami distorsi.

(2). Masalah kedua penyembuhan bagi luka-luka bangsa atas kekerasan dan ketidak adilan yang dilakukan pemerintah atas nama Negara.

(3). Masalah ketiga membangun integrasi horizontal dibidang sosial budaya.

Seperti dinyatakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (2009) bahwa kekhawatiran tentang perpecahan (*disintegrasi*) nasional agaknya berangkat dari kondisi di tanah air dewasa ini yang dapat digambarkan sebagai penuh konflik dan pertikaian. Gelombang reformasi telah menimbulkan berbagai kecederungan dan realitas baru, seperti dihujat dan dibongkarnya format politik Orde Baru, munculnya aliansi ideologi dan politik yang ditandai dengan menjamurnya partai politik baru, lahirnya tuntutan daerah di luar Jawa agar mendapatkan otonomi yang lebih luas atau merdeka sendiri, serta terjadinya konflik dan benturan antara etnik dengan segala permasalahannya. Saat negeri ini belum bisa mengatasi krisis nasional yang masih berlangsung, terutama krisis ekonomi, fenomena politik dewasa ini telah benar-benar meningkatkan derajat kekhawatiran atas kukuhnya integrasi nasional kita

3. Konsepsi Negara Integralistik

Dalam subbab ini perlu diuraikan sedikit mengenai makna "Integralistik", untuk membedakan dengan "Integrasi". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2002, kata "Integralistik" berasal dari kata "Integral" (a = *ajective* = kt. sifat), berarti (1) mengenai keseluruhan; meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; bulat; sempurna; (2) tidak terpisahkan; terpadu. Sedangkan "Integralistik" memiliki makna "bersifat integral; merupakan satu keseluruhan". Dalam subbab ini akan dibahas makna "Integralistik" dalam kaitannya dengan sistem kenegaraan, khususnya yang berlaku di Negara Indonesia.

Berkaitan dengan sistem kenegaraan, salah seorang pendiri negara (*founding fathers*) kita, Prof. Dr. Mr. Soepomo petama kali melontakan gagasan mengenai konsep negara integralistik dalam sidang BPUPKI, 31 Mei 1945 sebagai sebagai ajaran yang cocok dengan aliran pikiran ketimuran dan cita-cita kenegaraannya sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia, yaitu ajaran Spinoza, Adam Muller, dan Hegel (Marsillam Simanjutak, 1997). Sebaliknya, Adnan Buyung Nasution dalam desertasinya Tahun 1992 menyatakan bahwa ide negara integralistik yang dilontarkan oleh Soepomo tersebut lebih dipengaruhi oleh kehadiran Jepang daripada ahli filsafat barat tersebut (Adnan Buyung Nasution, 1995).

Pemikiran Prof. Dr. Mr. Soepomo tentang konsep negara integralistik atau faham negara kekeluragaan tersebut menurut banyak kalangan sangat berpengaruh dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun kemudian.

Dalam pidatonya dihadapan Sidang Umum BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In, Jl. Pejambon No. 6 Jakarta Pusat, Prof. Soepomo menawarkan tiga teori tentang dasar dan prinsip negara sebagai alternatif di dalam pembentukan negara Indonesia kelak.

1. Teori Perseorangan atau Teori Individualistik

   J.J. Rousseau dalam bukunya "*du Contract Social*" mengemukakan bahwa negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh individu dalam msayarakat untuk menjamin hak-hak individu dalam masyarakat. Penganut teori ini adalah: Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan Laski.

2. Teori Pertentangan Kelas atau Teori Golongan

   Menurut teori ini, negara merupakan alat dari suatu golongan yang kuat untuk menindas golongan yang lemah. Dalam teori ini negara mempertentangkan antara golongan yang kuat dengan golongan yang lemah, dimana golongan yang kuat dengan menggunakan kekuasaan negara dapat menindas golongan yang lemah. Penganut teori ini adalah: Karl Marx, Engels, dan Lennin.

3. Teori atau Konsep Negara Integralistik

   Dalam konsep negara integralistik, yang diadasarkan pada ide Spinoza, Adam Muller, dan Hegel, negara tidak untuk menjamin kepentingan individu maupun kepentingan golongan tertentu, tetapi untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang integral.

Dalam konsep negara integralistik, negara adalah kesatuan masyarakat yang organis dan tersusun secara integral. Di dalamnya, segala golongan, bagian, dan individu berhubungan erat satu sama lain. Pemikiran ini didasarkan pada prinsip persatuan antara pemimpin dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya. Bagi Soepomo, konsep negara seperti ini cocok dengan alam pikiran ketimuran dan prinsip tersebut didasarkan pada struktur sosial masyarakat Indonesia yang asli yang terdapat di desa-desa di Indonesia. Bagi Soepomo, hal itu tidak lain merupakan ciptaan kebudayaan Indonesia sendiri (Marsillam Simanjuntak, 1997).

Struktur sosial Indonesia meliputi aliran pikiran dan semangat kebatinan. Struktur kerokhanian bersifat persatuan hidup antara persatuan kawulo-gusti. Persatuan dunia luar dan dunia batin, persatuan mikrokosmos dan makrokosmos. Persatuan antara rakyat dengan pemimpinnya. Inilah yang disebut Soepomo sebagai ide atau konsep negara integralistik. Dalam Susunan persatuan antara rakyat dengan pemimpinnya itu, segala golongan diliputi semangat gotong-royong dan kekeluargaan. Inilah struktur sosial asli bangsa Indonesi. Hakekat Republik Indonesia adalah Republik Desa yang besar dengan unsur dan wawasan yang modern.

Konsep negara integralistik yang ditawarkan oleh Prof. Soepomo dalam sidang BPUPKI tersebut tidak begitu saja diterima oleh peserta sidang, seperti Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Mohammad Yamin yang menentang usulan tersebut. Mereka menuntut agar hak warga negara dijamin oleh Konstitusi. Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin khawatir ide negara integralistik yang ditawarkan oleh Soepomo tersebut akan memberi celah bagi timbulnya negara kakuasaan.

Kekhawatiran mereka akhirnya membawa pada jalan kompromi dengan diberikannya jaminan kepada warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, yang kemudian dimasukkan dalam pasal 28 UUD 1945.

c. Rangkuman

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di

dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.

Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Bagi bangsa Indonesia konsep wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya konsep itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila sebagaimana terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Integrasi dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika kelompok sosial tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan-hubungan sosial, ekonomi, politik. Kelompok-kelompok sosial tersebut dapat terwujud atas dasar agama dan kepercayaan, suku, ras, dan kelas. Konsepsi tersebut mengisyaratkan bahwa integrasi tercipta melalui proses interaksi dan komunikasi yang efektif.

Pemahaman integralistik yang dianut oleh bangsa Indonesia bersumber dari pemikiran Mr. Soepomo yang disampaikan pada sidang BPUPKI pada tahun 1945 yang merupakan salah satu aliran dalam teori tentang negara bahwa negara dibentuk tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan tetapi untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan.

Dalam konsep negara integralistik, negara adalah kesatuan masyarakat yang organis dan tersusun secara integral. Di dalamnya, segala golongan, bagian, dan individu berhubungan erat satu sama lain. Pemikiran ini didasarkan pada prinsip persatuan antara pemimpin dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya.

Bagi Soepomo, konsep negara seperti ini cocok dengan alam pikiran ketimuran dan prinsip tersebut didasarkan pada struktur sosial masyarakat Indonesia yang asli yang terdapat di desa-desa di Indonesia, dan hal itu tidak lain merupakan ciptaan kebudayaan Indonesia sendiri. Namun ide tersebut ternyata mendapatkan tantangan dari beberapa kalangan, antara lain Drs. Mohammad Hatta dan Prof. Mr. Mohammad Yamin, yang mengkhawatirkan akan menimbulkan negara

kekuasaan yang tidak menjamin kebebasan warga negaranya untuk menyatakan pendapat.

d. Latihan 2

1) Jelaskan pengertian wawasan kebangsaan yang saudara ketahui.
2) Jelaskan mengenai Wawasan Kebangsaan Indonesia yang saudara ketahui.
3) Jelaskan pengertian integrasi nasional.
4) Jelaskan konsep integrasi nasional Indonesia.
5) Mengapa konsep negara integralistik Soepomo mendapatkan tantangan dari beberapa negarawan Indonesia, jelaskan!

e. Tes Formatif

I. Pilihlah B jika pernyataan benar, dan A jika pernyataan tersebut salah

1. Pada awal perjuangan melawan penjajah, bangsa Indonesia masih berjuang secara lokal.
2. Kesadaran untuk bersatu di dalam melakukan perjuangan diawali dengan terbentuknya pergerakan pemuda nasional.
3. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa Indonesia mendayagunakan kondisi geografis negara.
4. Tonggak lahirnya masa kebangkitan nasional dipelopori oleh Budi Utomo pada Tahun 1928.
5. Konsep integrasi nasional pada hakekatnya identik dengan integrasi bangsa.

II. Pilihlah satu jawaban yang paling benar

6. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wawasan” memiliki arti ….
   a. tinjauan
   b. menilik
   c. konsepsi
   d. bayangan
7. “Kebangsaan” mengandung arti ….
   a. kesadaran diri sebagai warga suatu negara
   b. perasaan sebagai anggota masyarakat
   c. harga diri sebagai suatu bangsa
   d. bangsa yang memiliki kehndak untuk besatu
8. Konsep negara integralistik merupakan gagasan dari ….
   a. Prof. Muladi

b. Prof. Soepomo
c. Prof. Djoko Soetono
d. Prof. M. Yamin

9. Dalam bukunya "*du contract social*", … mengemukakan bahwa negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh individu dalam masyarakat.
   a. John Locke
   b. Engels
   c. Hegel
   d. Jean Jacques Rousseau
10. Bagi bangsa Indonesia, wawasan kebangsaan memiliki makna ….
   a. tidak memberikan ruang bagi fanatisme yang picik
   b. memberi ruang bagi persaingan ekonomi yang seluas-luasnya
   c. diperbolehkannya penguasaan mayoritas atas minoritas
   d. wawasan ke depan dalam melihat nasib bangsa

III. Pilihlah A jika pernyataan 1, 2, dan 3 benar
B jika pernyataan 1 dan 3 benar
C jika pernyataan 2 dan 4 benar
D jika semua pernyataan benar

11. Memahami wawasan kebangsaan pada hakekatnya sama dengan memahami makna wawasan nusantara sebagai suatu kesatuan ….
   1. politik
   2. sosial
   3. budaya
   4. hankam
12. Prof. Dr. Mr. Soepomo melontarkan gagasan negara integralistik dengan menawarkan model dengan teori ….
   1. individu
   2. golongan
   3. integrlistik
   4. monolistik
13. Konsep negara integralistik sebenarnya lahir melalui ide dari ….
   1. Spinoza
   2. Adam Muller

3. Hegel
4. Immanuel Kant

14. Konsep negara Integralistik dapat dijumpai pada ….
    1. Sila ketiga Pancasila
    2. Pembukaan UUD 1945
    3. Piagam Hak Asasi Manusia
    4. Penjelasan UUD 1945
15. Nilai Dasar wawasan kebangsaan memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental antara lain ….
    1. cinta tanah air
    2. kedaulatan rakyat
    3. kesetiakawanan sosial
    4. masyarakat adil dan makmur

f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban anda dengan Kunci Jawaban yang tersedia. Hitunglah jawaban anda dengan benar, kemudian gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat pemahaman anda terhadap materi kegiatan belajar ini.

$$\textbf{Nilai} = \frac{\textbf{Jumlah jawaban yang benar}}{\textbf{Jumlah keseluruhan soal}} \times 100$$

Kriteria Nilai

91	-	100	Sangat Baik
81	-	90	Baik
71	-	80	Cukup
61	-	70	Kurang
0	-	60	Sangat Kurang

Apabila nilai anda mencapai 81 atau lebih, berarti anda telah memahami materi kegiatan belajar ini.

Namun apabila nilai anda kurang dari 81, anda harus mempelajari kembali materi kegiatan belajar ini.

3. Kegiatan Belajar 3

Nilai-nilai Kejuangan, Membangun Karakter, dan Ketahanan Bangsa

a. Indikator

1. Mampu menjelaskan tentang nilai-nilai kejuangan
2. Mampu menjelaskan tentang hakekat mempelajari perjuangan bangsa
3. Mampu menjelaskan tentang jiwa dan makna dalam perjuangan
4. Mampu menjelaskan tentang nilai dan prinsip yang diwariskan
5. Mampu menjelaskan tentang membangun karakter
6. Mampu menjelaskan faktor-faktor membangun karakter bangsa Indonesia
7. Mampu menjelaskan tentang ketahanan nasional

b. Uraian dan contoh

Kegiatan belajar 3 ini membahas nilai-nilai kejuangan, membangun karakter dan ketahanan bangsa.

1) Nilai-nilai Kejuangan

Dari segi semantik nilai-nilai kejuangan terdiri dari dua istilah yaitu “Nilai” dan “Kejuangan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2002, “Nilai” memiliki arti: (1) harga (dalam arti taksiran harga), (2) angka kepandaian; biji; ponten. Sedang “Kejuangan” berarti, (1) perihal berjuang; (2) berhubungan dengan urusan berjuang.

Dengan demikian nilai kejuangan adalah konsep yang berkenaan dengan sifat, mutu, keadaan yang berguna bagi manusia dan kemanusiaan yang menyangkut perihal perang, kelahi, lawan, dan laga. Kata nilai kejuangan dikenakan terhadap konsepsi abstrak, anutan, faham dan pendorong yang menyebabkan orang dapat berperang, berkelahi, berlawan dan berlaga, sehingga bermanfaat bagi dirinya untuk menang (Suhady dan Sinaga, 2006).

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, nilai kejuangan dimaksudkan untuk menggambarkan daya pendorong, pelawan, dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk membebaskan dirinya dan penjajahan dan bebas merdeka. Nilai kejuangan diletakkan pada upaya selama bergenerasi-generasi untuk mencapai kemerdekaan. Nilai kejuangan seperti ini dimiliki oleh generasi pra 45 dan generasi 45. Nilai kejuangan ini mewaris terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya (Suhady dan Sinaga, 2006).

Semangat juang 45, adalah semangat untuk berjuang bersama tanpa pamrih mengusir penjajah. Setelah merdeka semangat kejuangan itu tetap relevan guna

membangun segala sesuatu yang dicita-citakan, yaitu memberantas kemiskinan, kebodohan, menegakkan kehidupan bersama yang jujur, melawan korupsi dan ketidakadilan merupakan sebuah “maha karya” dalam upaya membangun karakter bangsa (*nation and character building)*. Nilai-nilai kejuangan Angkatan 45 di tengah-tengah kehidupan yang semakin kompleks dewasa ini memang dirasakan kian kehilangan makna. Peringatan untuk mengenang perjuangan mereka yang telah menyerahkan jiwa-raga demi kejayaan bangsa, nyaris tidak lagi menarik minat generasi muda.

Generasi penerus bangsa sekarang ini sebagai pelaksana cita-cita pahlawan agar bentuk NKRI tetap utuh dibawah panji Pancasila dan UUD 1945 harus mewarisi semangat juang para leluhur yang dengan segala daya upaya rela berkorban demi masa depan bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki tekad dan semangat nilai-nilai juang 45 agar tidak gampang terbawa arus yang sudah mulai memasuki sendi-sendi kehidupan generasi muda.

2) Hakikat Mempelajari Perjuangan Bangsa

Suhady dan Sinaga (2006) menyatakan bahwa hakekat mempelajari dan menghayati sejarah perjuangan bangsa adalah upaya membangkitkan kesadaran nasional yang mengandung tiga dimensi, yaitu:

a) Peristiwa nasional di masa lampau;
b) Situasi nasional di masa lampau;
c) Aspirasi nasional di masa mendatang.

Bung Karno pernah membuat ungkapan “Jasmerah”, singkatan dari “jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Mengapa kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah dan harus mengenal sejarah kita sendiri? Karena ada perkataan bijak yang mengatakan "*history repeats itself*", sejarah itu berulang kembali. Hal yang pernah terjadi di masa lampau, suatu saat akan terjadi kembali dengan variasi yang berbeda tetapi esensinya sama. Manusia yang bijak adalah manusia yang belajar dari masa lalu dan tidak mengulangi kesalahan para pendahulunya.

Selain itu, dengan mempelajari catatan sejarah, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Betapa besar perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dengan mengorbankan harta dan nyawa, berjuang tanpa pamrih. Semua itu harus kita sadari, hormati, dan kita jadikan teladan dalam hidup.

Hakikat mempelajari sejarah adalah agar kita semua dapat belajar dari pengalaman sejarah. Dengan bercermin dari pengalaman perjuangan bangsa tersebut dapat dijadikan pelajaran bagaimana semangat para pahlawan dalam upaya mengubah kondisi dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka, bermartabat, dan diakui sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka di dunia.

Semangat nasionalisme berperan penting bagi suatu negara. Maju mundurnnya suatu negara dapat dilihat dari seberapa besar semangat nasinalisme yang dimiliki. Apabila suatu negara ingin tetap bersatu dan maju, maka semangat nasionalisme harus dimiliki oleh setiap warga negara pada umumnya, dan generasi muda pada khususnya, mengingat generasi muda adalah generasi penerus bangsa, penentu perjalanan bangsa di masa selanjutnya. Kita menyadari bahwa generasi muda mempunyai kelebihan pemikiran, semangat, serta sifat kritisnya, namun kelebihan tersebut masih kurang jika tidak diiringi dengan semangat nasionalisme.

Generasi muda harus mempunyai sikap bangga terhadap bangsanya, semangat kebersamaan, mengakui pengalaman sejarah dan kebudayaan bersama, serta terikat pada adat dan tradisi. Jika generasi pemuda menyadari pentingnya nasionalisme tersebut, maka jalan untuk memperbaiki kondisi negara kita akan semakin terbuka lebar.

Dengan demikian sebagaimana dinyatakan oleh Suhady dan Sinaga (2006) di atas, bahwa kemampuan pandang dari tiga dimensi tersebut harus dimiliki sehingga perjuangan bangsa Indonesia membimbing dan menjadi edukasi dan inspirasi bagi perjuangan selanjutnya.

3) Jiwa dan Makna dalam Perjuangan

Jiwa perjuangan telah terpateri dalam semangat setiap bangsa Indonesia sejak bangsa ini berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Jiwa perjuangan membentuk sifat mental yang mengandung moral yang luhur. Sifat mental yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur yang berkembang sejak masa perjuangan hingga saat ini, tidak mengenal kata menyerah dalam berjuang dan dilandasi rasa cinta tanah air, serta ikhlas dalam membela kepentingan nasional.

Nilai-nilai bangsa yang luhur yang sadar akan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk membina prinsip berani berkorban, serta wajar dan jujur dalam bertindak dan ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan membela kepentingan nasional.

Menurut Suhady dan Sinaga (2006), sifat mental yang mengandung moral nasional yang luhur dilandasi oleh:

a) Jiwa merdeka, yaitu jiwa yang sadar akan kemampuan sendiri tanpa ketergantungan pada negara lain dan memiliki martabat yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
b) Jiwa persatuan dan kesatuan, yaitu sadar akan pentingnya rasa pesatuan dan kesatuan bangsa.
c) Jiwa konsekwen tanpa pamrih dan sederhana, yaitu sadar untuk membela prinsip-prinsip, berani berkorban serta wajar dan jujur dalam bertindak.
d) Jiwa kokoh yang tak kenal menyerah, sadar membela nilai-nilai luhur, berinisiatif dan tak kenal menyerah.
e) Jiwa propatria, yaitu mempunyai rasa cinta yang besar terhadap tanah air.
f) Jiwa kepeloporan dan kepemimpinan, yaitu ikut aktif dalam berjuang dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.
g) Jiwa keikhlasan berjuang, yaitu ikhlas dalam membela kepentingan nasional.

4) Nilai dan Prinsip yang Diwariskan

Sistem nilai yang melandasi pembangunan masyarakat Indonesia sebagaimana tersirat dalam Pancasila dan kemudian dijabarkan dalam UUD 1945 tidak akan berubah meskipun lingkungan masyarakat Indonesia telah mengalami kemajuan dan perkembangan baik dalam bidang teknologi, informasi, maupun komunikasi.

Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup bangsa Indonesia (*Staatsgrundnorm*) menjadi pedoman bagaimana kita bertindak dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia tidak menolak kemajuan, tetapi sebagai bangsa yang berbudi luhur, seharusnya Pancasila dijadikan filter dari segala upaya memasukkan ajaran-ajaran ataupun faham-faham yang datangnya dari dunia luar.

Suhady dan Sinaga (2006) mengemukakan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diwariskan mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Nilai-nilai 1945
   (1). Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 penjelmaan falsafah dan pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945.
   (2). Lima sila dalam Pancasila merupakan nilai-nilai intrinsik yang abstrak umum universal tetap tak berubah terlepas dari perubahan dan perkembangan zaman dan kelimanya merupakan kesatuan yang bulat.

(3). Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Negara Kesatuan, tujuan negara, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, negara berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, negara yang merdeka dan berdaulat, dan anti penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

b) Prinsip penjelmaan Pancasila yang telah mendapatkan kesepakatan seluruh rakyat, yaitu:

(1). Prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945, misalnya; bentuk negara, sistem sosial budaya, sistem politik, dan sebagainya.

(2). Prinsip yang lahir dari perjuangan mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, yaitu rasa senasib sepenanggungan dan rasa persatuan yang kuat; mempertahankan dan mengembangkan kepribadian bangsa Indonesia yang berakar pada sejarah dan kebudayaan bangsa; mengambil segi positif dari kebudayaan bangsa lain yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan negara; merasa ikut memiliki, rasa kekeluargaan dan prinsip hidup gotong royong.

5) Membangun Karakter

Keberhasilan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam yang dimiliki, tetapi kemampuan sumber daya manusianyalah yang memegang peranan penting bagi berhasil tidaknya bangsa tersebut meraih cita-citanya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi dari sisi sumber daya manusianya masih belum memiliki kualitas yang memadai, tetapi sebaliknya, Jepang, misalnya, dari sisi sumber daya alamnya terbatas, namun dapat ditunjang dari sisi sumber daya manusianya yang telah memiliki kualitas yang sangat baik sehingga mereka menjadi negara yang sangat maju.

Kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki jiwa pengabdian yang tulus guna menunjang kesuksesan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

PNS sebagai unsur aparatur negara sekaligus sebagai unsur abdi masyarakat mutlak harus memiliki karakter sebagai PNS yang memiliki kesetiaan dan ketaatan penuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, Negara dan Pemerintah serta PNS bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berhasil guna,

bersih, professional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Suhady dan Sinaga, 2006).

6) **Faktor-faktor Membangun Karakter Bangsa Indonesia**

Suhady dan Sinaga (2006) menyatakan bahwa karakter manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan kunci yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita perjuangan guna terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila.

Dikatakan penting karena karakter mempunyai makna atau nilai yang sangat mendasar untuk mempengaruhi segenap pikiran, tindakan, dan perbuatan setiap insan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut meliputi:

a) Nilai kejuangan;
b) Nilai semangat;
c) Nilai kebersamaan atau gotong royong;
d) Nilai kepedulian atau solider;
e) Nilai sopan santun;
f) Nilai persatuan dan kesatuan;
g) Nilai kekeluragaan;
h) Nilai tanggung jawab.

7) **Ketahanan Nasional**

Kita semua menyadari bahwa setiap bangsa mempunyai cita-cita luhur dan indah yang ingin dicapainya. Orang mengatakan bahwa cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa mempunyai fungsi sebagai penentu dari tujuan nasionalnya. Lazimnya dalam usaha mencapai tujuan tersebut, bangsa bersangkutan menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang senantiasa perlu dihadapi ataupun ditanggulangi. Oleh karena itu, suatu bangsa harus mempunyai kemampuan, kekuatan, ketangguhan dan keuletan. Umumnya inilah yang dinamakan ketahanan nasional, yang dapat juga disebut sebagai ketahanan bangsa (Suhady dan Sinaga, 2006).

Ketahanan nasional diperlukan dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara dari segala gangguan baik yang datangnya dari dalam maupun dari dalam negeri. Untuk itu bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan.

1) Tujuan dan Fungsi Ketahanan Nasional

Srijanti, dkk (2009) menjelaskan tujuan, fungsi, dan sifat dari ketahanan nasional sebagai berikut:

a) Tujuan Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteran dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri.

b) Fungsi Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional mempunyai fungsi sebagai:

(1). Daya tangkal, dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

(2). Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.

(3). Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya diterjemahkan dalam RJP yang dibuat oleh pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

2) Perwujudan Ketahanan Nasional

Perwujudan Ketahanan Nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia meliputi (Bahan Penataran, BP7 Pusat, 1996):

a) Ketahanan ideologi, adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

b) Ketahanan politik, adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada pengembangan demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan memelihara

stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.

c) Ketahanan ekonomi, adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur.

d) Ketahanan sosial budaya, adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

e) Ketahanan pertahanan keamanan, adalah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan Negara dan menangkal semua bentuk ancaman.

3) Ciri dan asas ketahanan nasional

Ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia bertumpu pada budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga berbagai cirri ketahanan nasional yang dikembangkan tidak dapat dilepaskan dari tata kehidupan bangsa Indonesia (Suhady dan Sinaga, 2006).

a) Ciri Ketahanan Nasional

(1). Ketahanan nasional merupakan prasyarat utama bagi bangsa yang sedang membangun menuju bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal menyerah yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan dan gangguan yang timbul.

(2). Menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakan.

(3). Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air, setia kepada perjuangan, ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan antar bangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

b) Asas Ketahanan Nasional

Pengembangan ketahanan nasional bangsa Indonesia didasari pada asas-asas sebagai berikut:

(1). Kesejahteraan dan keamanan;

(2). Utuh menyeluruh terpadu;

(3). Kekeluargaan;

(4). Mawas diri;

c. Rangkuman

Nilai kejuangan adalah konsep yang berkenaan dengan sifat, mutu, keadaan tertentu yang berguna bagi manusia dan kemanusiaan yang menyangkut perihal perang, kelahi, lawan dan laga dan dikenal terhadap konsepsi abstrak, anutan, faham dan pendorong yang menyebabkan orang dapat berperang, berkelahi, berlawan, dan berlaga, sehingga bermanfaat bagi dirinya untuk menang.

Nilai kejuangan diletakkan pada upaya beberapa generasi untuk mencapai kemerdekaan yang dimiliki oleh generasi pra 1945 dan generasi 1945 karena pada tahun 1945 keberhasilan kemerdekaan bangsa Indonesia datang yang tentu saja bukan dibuat hanya oleh generasi 1945 karena nilai perjuangan mewaris terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Negara Kesatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia, mengatasi semua faham golongan, mengatasi semua faham perseorangan; tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; negara berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa

menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; negara yang merdeka dan berdaulat; anti penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Prinsip yang tercantum dalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik; menjunjung tinggi hak azasi manusia dengan kesetaraan antara individu dan masyarakat yang bersumber pada sifat kodrat individu juga makhluk sosial sebagai kesatuan dwi tunggal; sistem sosial budaya berdasarkan azas Bhinneka Tunggal Ika; sistem politik atas dasar kesamaan kedudukan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan; sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan; sistem pembelaan negara berdasarkan hak dan kewajiban bagi semua warga negara; sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan sendi negara hukum sendi kedaulatan rakyat; pemerintahan yang bertanggung jawab pada rakyat; pemerintahan presidensial karena Presiden adalah Kepala Pemerintahan; pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat; kekuasaan kehakiman yang bebas; otonomi daerah.

Membangun karakter adalah suatu proses/usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak/budi pekerti, insan manusia/masyarakat sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik.

Upaya membangun karakter bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan untuk membentuk tabiat, watak dan sifat kejiwaan yang berlandaskan kepada semangat pengabdian dan kebersamaan bangsa Indonesia; menyempurnakan karakter bangsa Indonesia yang ada untuk terwujudnya karakter yang diharapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; membina karakter bangsa Indonesia yang ada sehingga menampilkan karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan nilai falsafah bangsa Pancasila.

Ketahanan nasional adalah tingkat keadaan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengerahkan keseluruhan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi semua ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-cita.

Ketahanan nasional yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia meliputi ketahanan nasional bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan keamanan.

d. Latihan 3

1. Jelaskan pengertian nilai kejuangan dan prakteknya di Indonesia yang saudara ketahui!
2. Jelaskan nilai dan prinsip yang diwariskan di Indonesia yang saudara ketahui!
3. Jelaskan pengertian membangun karakter dan apa upaya bangsa Indonesia membangun karakter!
4. Jelaskan pengertian ketahanan nasional dan bagaimana pengembangannya oleh bangsa Indonesia!
5. Jelaskan tujuan dan fungsi ketahanan nasional dalam rangka usaha mewujudkan tujuan nasional bagi bangsa Indonesia!

e. Tes Formatif

I. Pilihlah B jika pernyataan benar dan A jika pernyataan salah

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nilai” mempunyai arti harga, angka, biji.
2. “Kejuangan” mempunyai arti: perihal berjuang, berhubungan dengan perang.
3. Hakekat mempelajari sejarah adalah agar kita semua dapat belajar dari pengalaman masa lampau.
4. “Jiwa merdeka” adalah jiwa yang sadar akam kemampuan diri sendiri dan tidak selalu menggantungkan pada orang lain.
5. Sistem nilai yang melandasi pembangunan bangsa tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945.

II. Pilihlah satu jawaban yang paling benar

6. Ikhlas dalam membela kepentingan nasional adalah cerminan dari jiwa ….
   a. merdeka
   b. persatuan dan kesatuan
   c. konsekwen
   d. keikhlasan
7. Perwujudan ketahanan nasional meliputi ketahanan di bidang ….
   a. sosial budaya
   b. karya
   c. seni
   d. ketertiban

8. Asas ketahanan nasional didasari hal-hal berikut kecuali ….
   a. partial
   b. keamanan
   c. kesejahteraan
   d. kekeluargaan
9. Nilai-nilai kejuangan bagi bangsa Indonesia dimaksudkan untuk menggambarkan … untuk membebaskan diri dari penjajahan.
   a. daya pendobrak
   b. daya saing
   c. potensi
   d. kelemahan
10. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945 yang merupakan prinsip yang diwariskan meliputi ….
   a. sistem politik
   b. nilai perjuangan
   c. sejarah masa lalu
   d. keinginan yang akan datang

III. Pilihlah A jika pernyataan 1, 2, dan 3 benar
B jika pernyataan 1 dan 3 benar
C jika pernyataan 2 dan 4 benar
D jika semua pernyataan benar

11. “Kebangsaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ….
   1. ciri-ciri yang menandai golongan bangsa
   2. perihal bangsa
   3. mengenai bangsa
   4. kesadaran diri sebagai warga suatu bangsa
12. Hal-hal berikut yang menjadi ciri dari wawasan kebangsaan adalah ….
   1. menjadi sumber perumusan kebijakan pemerintahan
   2. untuk pengembangan otonomi daerah
   3. untuk mencegah disintegrasi bangsa
   4. untuk mencegah rongrongan terhadap pemerintah pusat
13. NKRI yang merdeka bertekad untuk mewujudkan ….
   1. bangsa yang maju
   2. bangsa yang sejahtera

3. bangsa yang sejajar dengan bangsa lain
4. bangsa yang super power

14. Integrasi mempunyai makna ….
1. meliputi suatu bangsa
2. penyatuan
3. bersifat kebangsaan
4. pembauran

15. Penganut dari teori individualistik adalah ….
1. Thomas Hobes
2. Maurice Duverger
3. Laski
4. Karl Marx

f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban anda dengan Kunci Jawaban yang tersedia. Hitunglah jawaban anda dengan benar, kemudian gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat pemahaman anda terhadap materi kegiatan belajar ini.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah keseluruhan soal}} \times 100$$

Kriteria Nilai

91	-	100	Sangat Baik
81	-	90	Baik
71	-	80	Cukup
61	-	70	Kurang
0	-	60	Sangat Kurang

Apabila nilai anda mencapai 81 atau lebih, berarti anda telah memahami materi kegiatan belajar ini.

Namun apabila nilai anda kurang dari 81, anda harus mempelajari kembali materi kegiatan belajar ini.

4. Kegiatan Belajar 4

Sosial Budaya dan Wawasan Kebangsaan sebagai Kekuatan Bangsa

a. Indikator

1. Mampu menjelaskan tentang pengertian sosial budaya
2. Mampu menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang sosial budaya
3. Mampu menjelaskan tentang manfaat keragaman sosial budaya sebagai kekuatan bangsa
4. Mampu menjelaskan tentang wawasan kebangsaan sebagai kekuatan

b. Uraian dan contoh

Pada Kegiatan Belajar 4 ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang terkait dengan sosial budaya dan wawasan kebangsaan sebagai kekuatan bangsa Indonesia di dalam melaksanakan pembangunan nasional.

1) Pengertian Sosial Budaya

Sosial budaya terdiri dari dua kata, yaitu “sosial” dan “budaya”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga Tahun 2002, dinyatakan bahwa kata “sosial” mempunyai makna: (1) berkenaan dengan masyarakat; (2) suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb). Sedangkan “budaya” mempunyai makna: (1) pikiran; akal budi; (2) adat istiadat; (3) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju); (4) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Dengan demikian “sosial budaya” dapat diartikan sebagai “hal atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan untuk menolong atau memperhatikan kepentingan umum”.

Budaya berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “buddhaya” yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut “C*ulture*”, yang berasal dari kata Latin “*Colore*”, yaitu mengolah atau mengerjakan, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “kultur”.

Jika dikaitkan dengan konteks kehidupan berbangsa, maka dapatlah dikatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki sistem sosial budaya yang tinggi, Artinya bahwa Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai untuk senantiasa mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan individu, suka menolong sesama dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Dinamika Sosial Budaya Indonesia

Setiap kehidupan di dunia ini tergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya dalam arti luas. Akan tetapi berbeda dengan kehidupan lainnya, manusia membina hubungan dengan lingkungannya secara aktif. Manusia tidak sekedar mengandalkan hidup mereka pada kemurahan lingkungan hidupnya. Budi daya dalam memanfaatkan akal dan kemampuan dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan hal itu tidak terlepas dari kemampuan membina hubungan antar sesama anggota masyarakat tersebut dan mengelola lingkungan sebagai sumber dalam memenuhi kehidupannya.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mengelola lingkungan dan mengolah sumberdaya secara aktif sesuai dengan seleranya. Karena itulah manusia mengembangkan kebiasaan yang melembaga dalam struktur sosial dan kebudayaan mereka. Karena kemampuannya beradaptasi secara aktif itu pula, manusia berhasil menempatkan diri sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya di muka bumi dan paling luas persebarannya memenuhi dunia.

Di lain pihak, kemampuan manusia membina hubungan dengan lingkungannya secara aktif itu telah membuka peluang bagi pengembangan berbagai bentuk organisasi dan kebudayaan menuju peradaban. Dinamika sosial itu telah mewujudkan aneka ragam masyarakat dan kebudayaan dunia, baik sebagai perwujudan adaptasi kelompok sosial terhadap lingkungan setempat maupun karena kecepatan perkembangannya.

Dinamika sosial dan kebudayaan itu, tidak terkecuali melanda masyarakat Indonesia, walaupun luas spektrum dan kecepatannya berbeda-beda. Demikian pula masyarakat dan kebudayaan Indonesia pernah berkembang dengan pesatnya di masa lampau, walaupun perkembangannya dewasa ini agak tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan di negeri maju lainnya. Betapapun, masyarakat dan kebudayaan Indonesia yang beranekaragam itu tidak pernah mengalami kemandegan sebagai perwujudan tanggapan aktif masyarakat terhadap tantangan yang timbul akibat perubahan lingkungan dalam arti luas maupun pergantian generasi.

3) Kehidupan Sosial Budaya Manusia

Suhady dan Sinaga (2006) menyatakan bahwa istilah sosial budaya menunjuk kepada dua segi kehidupan manusia, yaitu ***segi kemasyarakatan*** dan ***segi kebudayaan***.

a) Kemasyarakatan

Manusia bekerja sama dengan sesama manusia lain atau bermasyarakat dalam usaha beradaptasi dengan lingkungan yang akan berjalan baik dalam tertib sosial dalam wadah organisasi sosial yang merupakan produk sosial budaya dan merupakan wadah perwujudan dan pertumbuhan kebudayaan.

Dalam organisasi sosial manusia hidup berkelompok dan mengembangkan norma sosial yang meliputi kehidupan normatif, status, kelompok asosiasi dan institusi. Organisasi sosial juga mencakup aspek fungsi yang mewujudkan diri dalam aktivitas bersama anggota masyarakat dan aspek struktur yang terdiri dari struktur kelompok dalam pola umum kebudayaan dan seluruh kerangka lembaga sosial.

Setiap masyarakat mempunyai empat unsur penting yang menentukan eksistensinya yaitu struktur sosial, pengawas sosial, media sosial dan standar sosial.

(1). Struktur sosial

Berarti setiap masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok untuk memudahkan pelaksanaan tugas.

(2). Pengawasan sosial

Pengawasan sosial mencakup sistem dari ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan dan tindakan anggota masyarakat, pengetahuan empiris yang digunakan manusia untuk menanggulangi lingkungan dan pengetahuan empiris yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia seperti agama, kepercayaan, ideologi dan sebagainya.

(3). Media sosial

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sosial, diperlukan adanya sarana komunikasi dan relasi antar anggota masyarakat. Komunikasi dan relasi itu dilangsungkan dengan menggunakan bahasa dan alat transportasi.

(4). Standar sosial

Standar sosial merupakan ukuran untuk menilai tingkah laku anggota masyarakat serta menilai tingkah laku anggota masyarakat mencapai tujuan.

b) Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para anggotanya yang tercipta oleh banyak faktor organ biologis manusia, lingkungan alam, lingkungan sejarah dan lingkungan psikologi. Masyarakat budaya membentuk pola budaya antara satu

atau beberapa fokus budaya yang dapat berupa nilai seperti keagamaan, ekonomi, ideologi dan sebagainya.

Pengertian sosial budaya adalah kondisi masyarakat / bangsa yang mempunyai nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketahanan di bidang sosial budaya adalah menggambarkan kondisi dinamis suatu bangsa / masyarakat yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara.

4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Sosial Budaya

Pembangunan aspek sosial budaya didasarkan atas cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Alinea Keempat yang menyatakan sebagai berikut:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial……."

Selanjutnya dalam pokok-pokok pikiran dalam Penjelasan Umum UUD 1945 antara lain dinyatakan sebagai berikut (catatan: sebelum UUD 1945 diamandemen):

"2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

3. ……

4. ….. negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab".

Maka jelaslah bahwa aspek sosial budaya yang merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam membina kehidupan bagi bangsa Indonesia sebenarnya telah mengakar dalam jiwa dan telah lama dipraktekan oleh bangsa Indonesia yang kemudian digali dan dirumuskan dalam Konstitusi negara Indonesia itu sendiri.

5) Faktor-faktor yang Mendorong Perkembangan Sosial Budaya

Pada hakekatnya dinamika sosial dan kebudayaan akan terjadi pada setiap masyarakat, tidak terkecuali pada masyarakat Indonesia. Pada masa lampau

Indonesia pernah mengalami kemajuan budaya yang sangat pesat, misalnya pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, dimana pengaruhnya masih dirasakan oleh negara-negara tetangga sampai saat ini. Namun ironisnya, yang terjadi saat ini kita malah tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.

Meskipun kita tidak mengalami kemandegan sama sekali (stagnan), namun ternyata dari sisi kemajuan yang dirasakan masih tertinggal dengan negara-negara tersebut, yang ternyata mengalami kemajuan yang lebih pesat.

Terdapat dua kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia, dimana kekuatan tersebut dapat memicu perubahan sosial, yaitu:

a) Kekuatan dari dalam masyarakat itu sendiri (*internal factor*), seperti pergantian generasi dan berbagai penenemuan dan rekayasa setempat.
b) Kekuatan yang berasal dari luar masyarakat (*external factor*), seperti pengaruh kontak-kontak antar budaya (*cultural contact*) baik secara langsung maupun melalui persebaran (unsur) kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat memacu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat yang harus menata kembali kehidupan mereka. Perubahan sosial budaya dapat terjadi bila sebuah kebudayaan melakukan kontak dengan kebudayaan asing. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat.

6) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan di Bidang Sosial Budaya

Suhady dan Sinaga (2006) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang sosial budaya sebagai berikut:

a) Tradisi sosial

Tradisi sosial memberikan kepada masyarakat/ bangsa seperangkat nilai dan kaidah yang diperlukan untuk menjawab tantangan setiap tahap perkembangan. Tradisi sosial ini pada dasarnya bersifat dinamis, karena itu nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang tidak dapat menjawab tantangan akan lenyap secara wajar. Dalam hal ini yang perlu dihindari adalah tradisionalisme, yaitu sikap atau pandangan menuju dan mempertahankan “peninggalan masa lampau secara berlebihan yang tidak wajar”.

Masyarakat harus dapat menilai dan menyadari bahwa suatu tradisi tertentu pada suatu tahap perkembangan mungkin tidak sejalan sehingga merugikan dan menghambat kemajuan.

b) Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap ketahanan di bidang sosial budaya. Melalui pendidikan masyarakat akan memperoleh kemampuan untuk menilai tradisi yang sudah tidak sesuai lagi. Pendidikan bersifat mengubah secara tertib ke arah tujuan yang dikehendaki.

Pendidikan dalam arti luas ialah usaha untuk mendewasakan manusia agar dapat mengembangkan potensinya serta berperan serta secara penuh dalam menumbuhkan kehidupan sosial sesuai dengan tuntutan zaman dan untuk itu diperlukan suatu sistem pendidikan yang kondusif sehingga mampu membawa masyarakat ke arah pencapaian tujuan.

Sistem pendidikan mempunyai berbagai sarana, diantara yang penting adalah:

(1). Seluruh aparatur pemerintahan modern;

(2). Sarana komunikasi massa;

(3). Pendidikan formal dan non formal;

(4). Sarana massa;

(5). Kehidupan kota.

Dalam masyarakat yang berkembang inisiatif pemerintah dan potensi yang ada merupakan yang paling kuat dan mampu menggerakkan pendidikan secara luas.

c) Kepemimpinan nasional

Untuk membina dan membangun masyarakat modern, diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan berwibawa. Kepemimpinan yang demikian ditentukan oleh banyak faktor, yaitu pribadi (moral, akhlak, semangat, dan akuntabilitas) pemimpin, komitmen pimpinan, tujuan nasional, nilai-nilai sosial budaya, keadaan sosial atau masyarakat, sistem politik, dan ilmi Pengetahuan.

d) Tujuan nasional

Tujuan nasional dapat merupakan unsur pengarah, pemersatu, pemberi motivasi dan merupakan salah satu identitas nasional. Tujuan nasional selalu berintikan falsafah negara.

e) Kepribadian nasional

Kepribadian nasional merupakan hasil perkembangan sejarah dan cita-cita bangsa yang dirumuskan sebagai dasar kehidupan bangsa. Kepribadian nasional ini perlu dipupuk, dibina dan dimasyarakatkan pada setiap generasi karena kepribadian nasional inilah merupakan daya tangkal yang sangat strategis untuk menghadapi tantangan pengaruh asing.

f) Bidang Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan adalah upaya rakyat semesta dengan TNI dan POLRI sebagai intinya. Merupakan salah satu fungsi pemerintahan dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan hasil perjuangan yang dilakukan dengan menyusun, mengerahkan serta menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat dalam semua bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.

7) Manfaat keragaman sosial budaya sebagai kekuatan bangsa

Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Bangsa yang besar tercermin dalam budayanya. Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung berbagai kemampuan dan nilai sosial budaya sebagai suatu bangsa adalah menjadi kekuatan bangsa di dalam setiap kali menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari dalam maupun dari luar, secara langsung atau tidak secara langsung yang dapat membahayakan pertahanan keamanan bangsa dan negara (Suhady dan Sinaga, 2006).

Selanjutnya dinyatakan bahwa sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang sangat beraneka ragam seiring dengan tempat (wilayah/daerah), etnis dan suku daerah yang bersangkutan. Namun keanekaragaman tersebut dapat sebagai perekat bangsa dan bahkan menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa kedudukan atau keberadaan sosial budaya dapat berperan demikian, oleh karena nilai-nilai sosial budaya tersebut mengandung nilai antara lain:

a) Adanya nilai kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan;
b) Adanya nilai yang berperan sebagai aturan, ketentuan yang telah membudaya dalam kehidupan kelompok masyarakat yang dijadikan acuan bagi anggota masyarakat dalam rangka berbuat (sikap dan tingkah laku);
c) Hubungan kemasyarakatan yang saling menghormati dan menghargai dalam kelompok-kelompok sosial yang dijadikan instrumen sosial dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan-kegiatan sosial;
d) Adanya standar yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam rangka menilai sikap dan tingkah laku serta cara masyarakat mencapai tujuan;
e) Adanya rasa solider antar sesama, Artinya mengakui, menghargai dan menghormati hak dan kewajiban serta hak asasi manusia dalam berbagai

hal/aspek (suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial dan sebagainya);

f) nilai persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa;

g) Nilai kesetiaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai-nilai sosial budaya tersebut merupakan dasar kekuatan untuk menyemangati operasional bila datang ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ketahanan nasional dan sosial budaya yang tangguh dan ampuh merupakan kekuatan bangsa Indonesia untuk menangkal setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam dan keberadaan sosial budaya sebagai kekuatan dan asset bangsa Indonesia disertai dengan pembangunan sosial budaya merupakan kunci sangat strategis dalam pembangunan nasional, dalam Suhady (2006: 82-84).

8) Wawasan Kebangsaan Sebagai Kekuatan Bangsa

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Para pejuang/ pendiri bangsa Indonesia yang telah melahirkan dan membentuk negara Indonesia dengan pemikiran yang arif dan bijaksana, dengan pandangan yang jauh ke depan telah meletakkan dasar yang kuat dan teguh di atas nama negara Indonesia yang dapat tumbuh dan berkembang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu prinsip dasar yang diletakkan adalah prinsip negara kesatuan yang bersifat integralistik dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

Negara Indonesia yang dikelola dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat dan kondisi obyektif ini pada satu sisi mengandung kekuatan tetapi pada sisi lain mengandung kelemahan. Ia mengandung kekuatan bila perbedaan dari keanekaragaman dapat hidup bersama dalam satu kesatuan yang harmonis, sebaliknya mengandung kelemahan bila perbedaan yang ada dalam keanekaragaman hidup dalam suasana penuh kecurigaan, pertentangan dan saling menghancurkan antar satu dengan yang lainnya (Suhady dan Sinaga, 2006).

Sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan yang ingin dikembangkan adalah sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan desentralistis dalam negara kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang menghendaki adanya pemerintahan pusat yang kuat dan berwibawa untuk menjamin terpeliharanya stabilitas nasional dan kesatuan bangsa sedangkan prinsip desentralisasi

menghendaki adanya pemerintahan daerah yang semakin dewasa, mandiri dan demokratis.

Dengan harmonisasi hubungan pusat dan daerah menuntut adanya wawasan kebangsaan yang memahami keberadaan wawasan kewilayahan/ kedaerahan yang memiliki karakteristik tertentu untuk dikembangkan dengan penuh prakarsa, kreasi, dewasa dan mandiri dan sebaliknya wawasan kewilayahan/ kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri hendaknya senantiasa ditempatkan secara proporsional untuk memperkuat pembinaan wawasan kebangsaan.

Wawasan kebangsaan yang memberikan ruang dan kesempatan untuk berkembangnya wawasan kewilayahan/ kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri pada hakekatnya menyadari bahwa wilayah negara Indonesia sangat luas yang berisikan masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat dan sebagainya yang justru dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mempersatukan dan membangun bangsa Indonesia yang besar.

Paham kebangsaan/ nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tetinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditujukan kepada negara dan bangsa yang merupakan paham modern yang lahir pada akhir abad ke 18 atau permulaan abad ke 19.

Sepanjang sejarah manusia dengan dimulainya kehidupan pertama manusia maka manusia memang telah terikat pada tanah tempat tinggal, pada tradisi orang tua, adat istiadat masyarakat lingkungan (Alvin Toffer).

Pada akhir abad ke 18 paham kebangsaan menampakkan diri sebagai paham yang sangat menentukan bagi gerakan sejarah modern umat manusia.
Revolusi Amerika dan revolusi Perancis sebagai titik awal lahirnya paham kebangsaan yang tidak dapat dibendung dan menjangkau penyebaran ke seluruh pelosok dunia.

Abad ke 19 adalah abad kebangsaan di Eropa, sedangkan abad ke 20 merupakan abad kebangkitan nasional bagi bangsa di Asia dan Afrika dan wadah nasionalisme menyentuh bangsa Indonesia pada permulaan abad ke 20 ketika pada tahun 1908 SUtomo dan Tjipto Mangoenkoesoemo mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai tonggak kebangkitan nasional bangsa Indonesia.

Dalam awal pertumbuhan nasionalisme/ paham kebangsaan diwarnai oleh slogan "*Liberty, Equality, Fraternity*" yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang demokratis, namun dalam perkembangan nasionalisme pada setiap bangsa sangat diwarnai oleh nilai dasar yang berkembang dalam masyarakat masing-

masing sehingga memberikan ciri khas / jati diri masing-masing bangsa dengan cara memahami pandangan hidup dan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa tersebut.

Jati diri bangsa Indonesia dapat dikenali dalam berbagai rumusan yang merupakan kesepakatan nasional yaitu bangsa Indonesia mengakui dan meyakini bahwa keberhasilan pembangunan nasional adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran serta keteguhan bangsa Indonesia pada falsafah Pancasila yang menjadi landasan idiil pembangunan nasional; keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan Pancasila; tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 (Suhady dan Sinaga 2006).

9) Nilai dasar wawasan kebangsaan

Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental yaitu:

a) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
b) Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu;
c) Cinta akan tanah air dan bangsa;
d) Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
e) Kesetiakawanan sosial;
f) Masyarakat adil dan makmur.

Dengan demikian wahana kehidupan religius diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi oleh negara, dan sewajarnya mewarnai hidup kebangsaan.

Wawasan kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan mengetengahkan manusia ke dalam pusat hidup bangsa yang berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa setiap pribadi harus dihormati.

Wawasan kebangsaan menegaskan bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi subyek dari semua usaha pembangunan bangsa dalam semua bidang kehidupan berbangsa bertujuan agar setiap pribadi warga bangsa dapat menjalankan hidupnya secara bertanggungjawab demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, maju dan mandiri akan berhasil dengan kesatuan dan persatuan bangsa yang kukuh dan berjaya.

Cinta akan tanah air dan bangsa menegaskan nilai sosial dasar dan wawasan kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi akan kebersamaan yang luas yang melindungi setiap warga dan menyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi setiap warga dan sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas manusia yang mengakui hak dan kewajiban asasi sesama manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Nasionalisme sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka. Paham kebangsaan/ nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan kebangsaan selalu berkaitan erat dengan demokrasi karena tanpa demokrasi kebangsaan akan mati bahkan merosot menjadi Fasisme / Naziisme yang bukan saja berbahaya bagi berbagai minoritas dalam bangsa yang bersangkutan tetapi juga berbahaya bagi bangsa lain.

Kesetiakawanan sosial sebagai nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosialbagi seluruh rakyat dan wawasan kebangsaan menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat lebih dari hanya kemakmuran yang paling tinggi dari jumlah orang yang paling hebat. Kesejahteraan rakyat lebih dari keseimbangan antara kewajiban sosial dan keuntungan individu.

Kesejahteraan sosial disebut juga kesejahteraan umum yang mencakup keseluruhan lembaga dan usaha dalam hidup sosial yang membangun dan memungkinkan setiap pribadi, keluarga dan kelompok sosial lain untuk mencapai kesempurnaan secara lebih penuh dan dengan lebih mudah.

Kebangsaan dan demokrasi bukanlah tujuan tetapi merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu ciri khas dari negara demokrasi yang membedakan dari negara totaliter adalah toleransi. Wawasan kebangsaan menegaskan bahwa demokrasi tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas karena dalam demokrasi

semua dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan tidak mengutamakan pengambilan keputusan dengan suaru terbanyak (voting). Hal yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda dan ada sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.

10) Manfaat / Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan mengutamakan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan diharapkan manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan itu, hendaknya dipupuk penghargaan terhadap martabat manusia, cinta kepada tanah air dan bangsa, demokrasi dan kesetiakawanan sosial.

Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan, karena persatuan tidak boleh mematikan keanekaan dan kemajemukan, sebaliknya keanekaan dan kemajemukan tidak boleh menjadi pemecah belah tetapi menjadi hal yang memperkaya persatuan.

Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik, dengan mengamanatkan agar para warga membina dengan jiwa besar dengan setia cinta akan tanah air tanpa kepicikan jiwa. Cinta tanah air dan bangsa sekaligus diarahkan pada kepentingan seluruh umat manusia yang saling berhubungan dengan berbagai jaringan antar ras, antar bangsa dan antar negara.

Mencermati makna wawasan kebangsaan tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa Wawasan Kebangsaan Indonesia pada hakekatnya dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia (Suhady dan Sinaga, 2006)

c. Rangkuman

Pengertian sosial budaya adalah kondisi masyarakat / bangsa yang mempunyai nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang sosial budaya antara lain tradisi sosial, pendidikan, kepemimpinan dan penyelenggara negara, tujuan nasional, kepribadian nasional, pertahanan dan keamanan.

Sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang sangat beraneka ragam seiring dengan tempat / wilayah / daerah, etnis dan suku daerah yang bersangkutan dapat sebagai perekat bangsa dan bahkan menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wawasan kebangsaan yang memberikan ruang dan kesempatan untuk berkembangnya wawasan kewilayahan / kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri pada hakekatnya menyadari bahwa wilayah negara Indonesia sangat luas yang berisikan masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat dan sebagainya yang justru dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mempersatukan dan membangun bangsa Indonesia yang besar.

Wawasan kebangsaan mengutamakan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan diharapkan manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa Indonesia.

d. Latihan 4

1. Jelaskan pengertian sosial budaya yang saudara ketahui.
2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang sosial budaya. Yang saudara ketahui.
3. Jelaskan sosial budaya yang berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Jelaskan pengertian wawasan kebangsaan yang diterapkan oleh bangsa Indonesia.
5. Jelaskan manfaat wawasan kebangsaan bagi perkembangan peradaban bangsa Indonesia.

e. Tes Formatif 4

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling benar !

1. Salah satu dari empat unsur penting yang menentukan eksistensi setiap masyarakat adalah ….
   A. struktur sosial
   B. dana sosial
   C. bantuan sosial

D. lembaga sosial

2. Setiap masyarakat yang terdiri dari kelompok untuk memudahkan pelaksanaan tugas disebut ….
   A. pengawas sosial
   B. struktur sosial
   C. media sosial
   D. standar sosial

3. Sarana komunikasi dan relasi antar anggota masyarakat yang dilangsungkan dengan menggunakan bahasa dan alat transportasi dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sosial disebut ….
   A. struktur sosial
   B. standar sosial
   C. media sosial
   D. pengawas sosial

4. Keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para anggotanya yang tercipta oleh banyak faktor organ biologis manusia, lingkungan alam, lingkungan sejarah dan lingkungan psikologi disebut ….
   A. dinas sosial
   B. kementerian sosial
   C. kemasyarakatan
   D. kebudayaan

5. Faktor yang besar pengaruhnya terhadap ketahanan di bidang sosial budaya adalah ....
   A. pendidikan
   B. kesehatan
   C. ketuhanan
   D. kemanusiaan

6. Moral, akhlak, semangat dan akuntabilitas adalah unsur penting dalam faktor….
   A. pribadi pedagang kaki lima
   B. pribadi pemimpin
   C. pribadi petani

D. pribadi nelayan

7. Wawasan nasional yang berintikan kekompakan, kesatuan, serta keterpaduan antara pemerintah, angkatan bersenjata dan rakyat dianut dalam doktrin ….
   A. kemanusiaan
   B. keadilan sosial
   C. pertahanan keamanan
   D. musyawarah mufakat

8. Sikap mental percaya kepada diri sendiri, rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang sehat dan rasional sebagai pengganti sikap mental bangsa Indonesia yang merasa tergantung kepada bekas penjajah ....
   A. Inggris
   B. Portugis
   C. Amerika Serikat
   D. Belanda

9. Bangsa yang besar tercermin dalam ….
   A. budaya
   B. ekonomi
   C. hukum
   D. sosial

10. Sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang sangat beraneka ragam seiring dengan tempat/ wilayah/ daerah, etnis dan suku daerah yang bersangkutan dapat ….
    A. sebagai pemecah bangsa
    B. sebagai perekat bangsa
    C. sebagai penghancur bangsa
    D. sebagai pemusnah bangsa

11. Nilai sosial budaya merupakan ... untuk menyemangati operasional bila datang ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ketahanan nasional.
    A. dasar kelemahan
    B. dasar keraguan
    C. dasar kekuatan

D. dasar keyakinan

12. Keberadaan sosial budaya sebagai kekuatan dan asset bangsa Indonesia disertai dengan pembangunan sosial budaya merupakan … dalam pembangunan nasional.
    A. siraman air hujan strategis
    B. batu ganjal strategis
    C. pengungkit strategis
    D. kunci sangat strategis

13. Sepanjang sejarah manusia dengan dimulainya kehidupan pertama manusia maka manusia telah terikat pada tanah tempat tinggal, pada tradisi orang tua, adat istiadat masyarakat lingkungan yang disampaikan oleh ....
    A. Alvin Toffer
    B. J.H.A. Logeman
    C. Sutomo
    D. Tjipto Mangoenkoesoemo

14. Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki … dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental
    A. empat
    B. lima
    C. enam
    D. tujuh

15. Wawasan kebangsaan mengutamakan kepada seluruh bangsa Indonesia agar ... untuk kepentingan bangsa Indonesia.
    A. membagikan uang tunai
    B. membagikan sembako
    C. sanggup dan rela berkorban
    D. membagikan pakaian

f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban anda dengan Kunci Jawaban yang tersedia. Hitunglah jawaban anda dengan benar, kemudian gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat pemahaman anda terhadap materi kegiatan belajar ini.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah keseluruhan soal}} \times 100$$

Kriteria Nilai

91	-	100	Sangat Baik
81	-	90	Baik
71	-	80	Cukup
61	-	70	Kurang
0	-	60	Sangat Kurang

Apabila nilai anda mencapai 81 atau lebih, berarti anda telah memahami materi kegiatan belajar ini.

Namun apabila nilai anda kurang dari 81, anda harus mempelajari kembali materi kegiatan belajar ini.

g. TES SUMATIF

I. BENAR/SALAH

Pilihlah B bila *Benar* atau S bila *Salah*!

1. B - S Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesa dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal menurut George Wihelm Fredrich Hegel.
2. B - S Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dengan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan menurut Soenarko.
3. B - S Hakekat mempelajari dan menghayati sejarah perjuangan bangsa adalah upaya membangkitkan kesadaran nasional yang mengandung arti peristiwa nasional di masa lalu, situasi nasional di masa kini dan aspirasi nasional di masa

mendatang.

4. B - S Sifat karakter suatu bangsa / masyarakat dapat dikenali dari dua sifat yaitu karakter yang bersifat positif dan karakter yang bersifat negatif.
5. B - S Sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan yang ingin dikembangkan adalah sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan desentralis dalam negara kesatuan yang utuh dan menyeluruh.
6. B - S Bangsa terbentuk karena ada kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter yang tumbuh karena adanya persamaan nasib menurut F. Ratzel dari Jerman.
7. B - S Unsur negara harus ada bendera, harus ada uang, harus ada lambang binatang yang dicintai seluruh bangsa.
8. B - S Wawasan kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
9. B - S Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional.
10. B - S Pemahaman integralistik yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai suatu Integrasi Nasional Indonesia bersumber dari pemikiran dr. Sutomo.

II. PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

11. Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama disampaikan oleh ….
    A. Kansil
    B. R. Djokosoetono
    C. Budiyanto
    D. J.H.A. Logeman

12. Bila orang-orang yang hidup bebas merdeka terlepas satu sama lain berjanji agar kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin maka dalam Suhady dan Sinaga suatu negara telah terjadi menurut teori ....
    A. keTuhanan
    B. kenyataan
    C. penaklukan
    D. perjanjian

13. Suatu daerah tertentu melepaskan diri dari negara yang menguasai sebelumnya dan menyatakan diri sebagai suatu negara baru maka dalam Suhady dan Sinaga suatu negara telah terjadi menurut teori ....
    A. keTuhanan
    B. penaklukan
    C. kenyataan
    D. perjanjian

14. Suatu negara yang merdeka dan berdaulat di seluruh negara dan yang berkuasa hanya ada satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah dan pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan daerah dalam wilayah negara serta pemerintahan dapat dilaksanakan dengan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi, maka menurut Suhady dan Sinaga merupakan bentuk negara ....
    A. kerajaan
    B. kerakyatan
    C. kesatuan
    D. serikat

15. Suatu negara harus memenuhi syarat yaitu ada rakyat yang bersatu, ada daerah/ wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat dan mendapat pengakuan dari negara lain disampaikan oleh ....
    A. Oppenheimer dan Lauterpacht
    B. J.H.A. Logeman
    C. Budiyanto
    D. R. Djokosoetono

16. Unsur negara harus ada wilayah, harus ada rakyat, harus ada pemerintahan yang berkuasa terhadap seluruh daerah dan rakyat dan harus ada tujuan disampaikan oleh ....
    A. Budiyanto
    B. J.H.A. Logeman
    C. Kansil
    D. R. Djokosoetono

17. Bangsa terbentuk karena ada kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter yang tumbuh karena adanya persamaan nasib disampaikan oleh ….
    A. Otto Bauer
    B. J.H.A. Logeman
    C. Budiyanto
    D. R. Djokosoetono

18. Kebangsaan adalah tindak tanduk kesadaran dan sikap yang memandang diri sebagai suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama disampaikan oleh ….
    A. Parangtopo
    B. J.H.A. Logeman
    C. Budiyanto
    D. R. Djokosoetono

19. Guna penerapan konsep wawasan kebangsaan perlu dipahami 2 aspek yaitu aspek ….
    A. emosional & aspek spiritual
    B. intelektual & aspek emosional
    C. moral & aspek intelektual
    D. spiritual & aspek moral

20. Wawasan Kebangsaan Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang dan mengkristal dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam membentuk negara Indonesia yang tercetus pada waktu diikrarkan ....
    A. Sumpah Pemuda
    B. Sumpah Palapa
    C. Sumpah Presiden

D. Ketua PNS

21. Integritas nasional sebagai suatu konsep dalam kaitan dengan wawasan kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan pada aliran pemikiran/ paham ….
    A. integralistik
    B. futuralistik
    C. klasik
    D. neo-klasik

22. Pemahaman integralistik yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai suatu Integrasi Nasional Indonesia bersumber dari Pemikiran ….
    A. Kansil
    B. J.H.A. Logeman
    C. Mr. Soepomo
    D. R. Djokosoetono

23. Dengan paham integralistik/ kebersamaan maka bangsa Indonesia percaya akan dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin menurut uraian ….
    A. Mr. Soepomo
    B. J.H.A. Logeman
    C. Budiyanto
    D. R. Djokosoetono

24. Peristiwa nasional di masa lalu dapat dilihat dari aspek ….
    A. sosial, budaya
    B. politik, ekonomi, rohani
    C. kemanusiaan
    D. spiritual

25. Jiwa perjuangan bangsa antara lain berupa jiwa ….
    A. bangsawan
    B. priyayi
    C. merdeka sadar akan kemampuan sendiri
    D. pedagang

26. Salah satu nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi ….
    A. segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
    B. hewan langka yang hidup di suaka marga satwa di seluruh dunia
    C. tanaman langka yang tumbuh di hutan lindung di seluruh dunia
    D. pencemaran udara di seluruh dunia

27. Salah satu karakter positif bangsa Indonesia adalah karakter….
    A. saling menyerang desa tetangga
    B. masa bodoh
    C. mau menang sendiri
    D. saling menghormati dan saling menghargai antara sesama

28. Ketahanan nasional/ ketahanan bangsa yang dikembangkan bangsa Indonesia meliputi ketahanan nasional/ ketahanan bangsa pada ….
    A. tiga bidang (ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan)
    B. empat bidang (politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan)
    C. lima bidang (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan)
    D. dua bidang (ideologi & pertahanan keamanan)

29. Faktor yang melemahkan ketahanan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa di NKRI disebabkan terjadinya konflik ….
    A. horizontal & konflik politik
    B. konflik sosial
    C. konflik budaya
    D. konflik militer

30. Salah satu dari empat unsur penting yang menentukan eksistensi setiap masyarakat adalah ....
    A. struktur sosial
    B. dana sosial
    C. bantuan sosial
    D. lembaga sosial

31. Keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para anggotanya yang tercipta oleh banyak faktor organ biologis manusia, lingkungan alam, lingkungan sejarah dan lingkungan psikologi disebut ….

A. dinas sosial
B. kementerian sosial
C. kemasyarakatan
D. kebudayaan

32. Sikap mental percaya kepada diri sendiri, rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang sehat dan rasional sebagai pengganti sikap mental bangsa Indonesia yang merasa tergantung kepada bekas penjajah ....
A. Inggris
B. Portugis
C. Amerika Serikat
D. Belanda

33. Nilai sosial budaya merupakan dasar … untuk menyemangati operasional bila datang ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ketahanan nasional.
A. kelemahan
B. keraguan
C. kekuatan
D. keyakinan

34. Sepanjang sejarah manusia dengan dimulainya kehidupan pertama manusia maka manusia telah terikat pada tanah tempat tinggal, pada tradisi orang tua, adat istiadat masyarakat lingkungan, seperti yang disampaikan oleh ….
A. Alvin Toffer
B. J.H.A. Logeman
C. Sutomo
D. Tjipto Mangoenkoesoemo

35. Wawasan kebangsaan mengutamakan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk ... untuk kepentingan bangsa Indonesia.
A. membagikan uang tunai
B. membagikan sembako
C. sanggup dan rela berkorban
D. membagikan pakaian

h. Kunci Jawaban (Tes Formatif 1-4 & Tes Sumatif)

Kunci Jawaban Tes Formatif 1

1. a
2. a
3. b
4. a
5. b
6. c
7. b
8. c
9. a
10. b
11. d
12. a
13. a
14. c
15. d

Kunci Jawaban Tes Formatif 2

1.b
2.a
3.a
4.a
5.b
6.c
7.a
8.b
9.d
10.a
11.d
12.a.
13.a
14.c
15.d

Kunci Jawaban Tes Formatif 3

1.a
2.b
3.c
4.d
5.a
6.b
7.c
8.d
9.a
10.b
11.c
12.d
13.a
14.b
15.c

Kunci Jawaban Tes Formatif 4

1.a	11.c
2.b	12.d
3.c	13.a
4.d	14.b
5.a	15.c
6.b	
7.c	
8.d	
9.a	
10.b	

Kunci Jawaban Tes Sumatif (10 soal BS & 25 soal PG)

1.b	11.b	21.a	31.d
2.b	12.d	22.c	32.d
3.b	13.b	23.a	33.c
4.b	14.c	24.b	34.a
5.b	15.a	25.c	35.d
6.s	16.c	26.a	
7.s	17.a	27.d	
8.b	18.a	28.c	
9.b	19.c	29.a	
10.s	20.a	30.a	

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Asvi Warman, DR dan Syafuan Rozi, *Renungan di hari kemerdekaan*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik, LIPI, 2008).

BP7 Pusat. *Pedoman Penataran P4, UUD 1945, dan GBHN*, 1996

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik,*PT Gramedia Jakarta, 2010

Budiman, Arief. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002

Budiyanto, *Dasar-dasar Imu Tatanegara*, 1997

Cahyoyo, Hari, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, 1986

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Tahun 2002

Kansil, *Sistim Pemerintahan Indonesia*, 1987

Lembaga Informasi Nasional, *Undang Undang Dasar Tahun 1945*

Lembaga Pengkajian Strategi & Pembangunan, *Pendidikan Wawasan Kebangsaan*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994

Moerdiono, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, 1991

Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, *Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995

Oesman, Oetojo dan Alfian, *Pancasila sebagai ideologi*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1993

Simanjuntak, Marsillam. *Pandangan Negara Integralistik*. PT. Anem Kosong Anem, Jakarta, 1997

Slamet, *Wawasan Kebangsaan dalam kerangka NKRI - Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan I, II*, Jakarta: Pusat Diklat Pegawai - Badan Diklat Keuangan, 2006

Soeprapto, Saafroedin Bahar, Ismail Arianto, *Cinta negara persatuan Indonesia*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1995

Srijanti, A. Rahman H.I, dan Purwanto, SK. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Graha Ilmu, Yogyakrta, 2009

Suhady, Idup dan A.M. Sinaga, *Wawasan Kebangsaan dalam kerangka NKRI -Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan I, II & III*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia, 2006

Tjokroamidjojo, Bintoro, *Dimensi Rohani dan Wawasan Kebangsaan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 1996

Wahyudi, Agung, *Kita adalah penerus*, Lampung: Jurusan Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, 2004